



LAPORAN PENELITIAN

ANALISIS KEUANGAN SEKTOR PUBLIK PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013-2017

Oleh:

**KETUA : WAHJUNY DJAMAA, SE.Ak, M.Sc.
ANGGOTA : 1. ARIS ADETIAS SAPUTRA**

**PENELITIAN INI DILAKSANAKAN ATAS BIAYA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA STIE GICI TAHUN AKADEMIK
2019/2020. NOMOR KONTRAK: 105/LPPM-GBS/VIII/2019**

**JURUSAN AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI "GICI"
2019**

SURAT PERJANJIAN KONTRAK PENELITIAN
Nomor : 105/LPPM-GBS/VIII/2019

Pada hari ini, Jum'at, tanggal Sembilan bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas (09-08-2019), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1) Sandi Noorzaman, S.Si, MM.
Selaku Ketua LPPM STIE "GICI" untuk dan atas nama Jurusan Akuntansi S1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "GICI", selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2) Wahjuny Djamaa, SE.Ak, M.Sc.
Selaku Peneliti, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; menyatakan bersepakat untuk membuat perjanjian kontrak penelitian sebagai berikut.

Pasal 1
JUDUL PENELITIAN

PIHAK PERTAMA dalam jabatannya tersebut di atas, memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan penelitian yang berjudul: "**Analisis Keuangan Sektor Publik Provinsi Jawa barat Tahun 2013-2017**"

Pasal 2
WAKTU DAN BIAYA PENELITIAN

- 1) Waktu penelitian adalah 6 bulan, dari 9 Agustus 2019 sampai dengan 10 Februari 2020.
- 2) Biaya pelaksanaan penelitian ini dibebankan pada pos Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Jurusan Peneliti bersangkutan tahun 2019/2020 dengan nilai kontrak sebesar **Rp. 7.166.000 (Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)**.

Pasal 3
PERSONALIA PENELITIAN

Susunan personalia penelitian ini sebagai berikut :

Ketua : WAHJUNY DJAMAA, SE.Ak, M.Sc
Anggota : 1. ARIS ADETIAS SAPUTRA

Pasal 4
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran biaya penelitian diberikan sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penelitian STIE "GICI", yaitu:

- 1) Tahap I sebesar 70% dari nilai kontrak yang diterimakan paling cepat dua minggu setelah surat perjanjian kontrak penelitian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak melalui Bendahara STIE "GICI".
- 2) Tahap II sebesar 30% dari nilai kontrak yang diterimakan setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan seluruh kewajiban pekerjaan penelitian

Pasal 5

KEASLIAN PENELITIAN DAN KEBEBAS-IKATAN DENGAN PIHAK LAIN

- 1) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas keaslian judul penelitian sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini (bukan duplikat/jiplakan/plagiat) dari penelitian orang lain.
- 2) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa judul penelitian tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain.
- 3) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa judul penelitian tersebut bukan merupakan penelitian yang **SEDANG ATAU SUDAH** selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun oleh sendiri.
- 4) Apabila di kemudian hari diketahui ketidak benaran pernyataan ini, maka kontrak penelitian dinyatakan batal, dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterima.

PASAL 6

PEMBIMBING/KONSULTAN PENELITIAN LATIHAN

- 1) Setiap Peneliti Latihan harus menunjuk seorang Pembimbing/Konsultan yang bertugas membimbing pelaksanaan penelitiannya.
- 2) Peneliti Latihan diharuskan berkonsultasi dengan pembimbingnya berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan serta laporan hasil penelitiannya.
- 3) *Honorarium* Pembimbing/Konsultan (untuk peneliti dari mahasiswa) ditanggung oleh institusi STIE “GICI” di luar nilai kontrak penelitian sesuai ketentuan yang berlaku, dan akan dibayarkan setelah laporan hasil penelitian beserta kelengkapannya diserahkan ke LPPM melalui Bendahara STIE “GICI”.

Pasal 7

MONITORING PENELITIAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
 - a) Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
 - b) Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan penelitian terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh Peneliti.
 - c) Bentuk sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Pemantauan kemajuan penelitian dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** bersama dengan *Reviewer*, dan Pembimbing Penelitian untuk Penelitian Latihan.
- (3) **PIHAK KEDUA** diharuskan membuat dan menyampaikan Laporan Kemajuan atas pelaksanaan penelitiannya kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak 2 (dua) eksemplar.
- (4) Pelaksanaan kemajuan penelitian dijadwalkan pada bulan ke-3 setelah Kontrak Penelitian ditandatangani (November 2019).
- (5) Format Laporan Kemajuan dan Teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian.

Pasal 8

LAPORAN SEMENTARA DAN SEMINAR HASIL PENELITIAN

- 1) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan laporan hasil penelitian sementara kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat pada 2 Maret 2020 sebanyak 2 (dua) eksemplar.
- 2) Laporan sementara itu digunakan sebagai bahan seminar hasil penelitian yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- 3) Ketua Peneliti diwajibkan hadir untuk mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar hasil penelitian.
- 4) Pelaksanaan teknis seminar hasil penelitian akan diatur tersendiri oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9
LAPORAN AKHIR PENELITIAN

- 1) Setelah seminar hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan revisi laporan penelitiannya dalam waktu paling lambat dua minggu.
- 2) Revisi laporan penelitian yang sudah diseminarkan harus mendapat pengesahan dari *reviewer* dan dijilid dalam satu kesatuan dengan laporan.
- 3) Berkas-berkas laporan meliputi:
 - (a) Laporan lengkap penelitian terdiri dari: (A) Laporan Hasil Penelitian, (B) Naskah Publikasi, dan (C) Sinopsis Penelitian Lanjutan (jika ada kelanjutan).
 - (b) Laporan akhir penelitian rangkap 4 (empat) dengan perincian 1 eks. Untuk LPPM, 1 eks. Untuk Perpustakaan STIE “GICI”, 1 eks. Untuk Jurusan.
 - (c) Naskah publikasi dalam bentuk *feature* sebanyak 2 eksemplar yang terpisah dari laporan akhir hasil penelitian. Naskah *feature* (dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*) ini disiapkan untuk publikasi di media massa.
 - (d) Disket atau CD berisi *file* laporan lengkap dan naskah publikasi bentuk *feature* sebanyak 1 keping.
- 4) Format laporan hasil penelitian sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan telah ditetapkan dalam Pedoman Penelitian STIE “GICI” dan suplemen ralatnya baik dalam hal warna sampul, tata tulis maupun urutan masing-masing komponen.
- 5) Pada sampul bagian tengah dituliskan nama Peneliti atau Tim Peneliti lengkap dengan gelar masing-masing, sedangkan pada bagian bawah dari laporan tersebut harus dituliskan pernyataan yang berbunyi:

**PENELITIAN INI DILAKSANAKAN ATAS BIAYA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA STIE “GICI”
TAHUN AKADEMIK 2019/2020
Nomor Kontrak : 105/LPPM-GBS/VIII/2019**

Pasal 10
HAK KEPEMILIKAN ATAS BARANG/PERALATAN PENELITIAN

Segala barang atau alat yang dibeli atas biaya penelitian menjadi milik Jurusan Peneliti yang bersangkutan. Pengaturan kepemilikannya sebagai berikut :

- 1) Barang atau alat berupa *catridge*, *printer*, alat perekam, akses internet, dan sejenisnya selama masih dapat menggunakan fasilitas STIE “GICI” pada dasarnya tidak dianggarkan dalam biaya penelitian.
- 2) Kamera, alat perekam, dan semacamnya yang dapat dipakai ulang, Buku, Jurnal, CD, VCD, DVD, *cassete*, dan sejenisnya yang merupakan *software*, program, alat atau referensi penelitian yang didapatkan (dibeli) dari anggaran penelitian menjadi milik Jurusan Peneliti.
- 3) Pemindahan hak kepemilikan barang atau alat sebagaimana tersebut dilakukan melalui **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 11
INSTITUSIONAL FEE

Dalam rangka penyeragaman dan efisiensi administrasi pelaporan penelitian, **PIHAK PERTAMA** melakukan pemotongan terhadap dana penelitian yang telah disetujui sebesar 5% dengan alokasi pemanfaatan antara lain untuk :

- 1) Penggandaan laporan akhir penelitian sebanyak 4 eksemplar.
- 2) Kegiatan penunjang penelitian bagi dosen/pengusul penelitian.

Pasal 12
SANKSI

Segala kelalaian baik disengaja maupun tidak, sehingga menyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan hasil penelitian dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Perjanjian ini akan mendapatkan sanksi sebagai berikut :

- 1) Diberhentikannya bantuan keuangan, dan **PIHAK KEDUA** diwajibkan mengembalikan dana yang sudah diterima kepada STIE “GICI” melalui **PIHAK PERTAMA**, atau
- 2) tidak diperbolehkan mengajukan usulan penelitian pada periode tahun anggaran tersebut bagi Ketua dan Anggota Peneliti.

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian ini berlaku sejak ditanda tangani dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Depok, 09 Agustus 2019,

PIHAK PERTAMA,



Sandi Noorzaman, S.Si, MM.

Ketua LPPM

PIHAK KEDUA,

Wahjuny Djamaa, SE.AK, M.Sc

Peneliti

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DOSEN STIE “GICI”**

Judul Penelitian : Analisis Keuangan Sektor Publik Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2017

Ketua Peneliti

- a. Nama Lengkap : Wahjuny Djamaa, SE.Ak, M.Sc
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. NIDN : 0024048601
- d. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
- e. Jurusan : Akuntansi
- f. Nomor Handphone : 081287154943
- g. Alamat E-mail : Unydjamaa@yahoo.com

Anggota Tim

- a. Nama Anggota 1/Jurusan : Aris Adetias Saputra /Akuntansi
- b. Nama Anggota 2/Jurusan : -

Lokasi Penelitian

: Sektor Publik Provinsi Jawa Barat

Alamat

: -

Lama Penelitian

: 6 (Enam) Bulan

Biaya yang diperlukan

: Rp. 7.166.000

Sumber Pendanaan

: LPPM GICI

Sumber Lain

:

Depok, 2 Maret 2020

Mengetahui:
Ketua Jurusan,

Ketua Peneliti



Anessa Musfitria, SE, M.Si, M.S.Ak.

Wahjuny Djamaa, SE.Ak, M.Sc

NIDN: 0423047804

NIDN: 0024048601

Menyetujui,
Ketua LPPM STIE GICI

 **LPPM**
GICI BUSINESS SCHOOL
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

Sandi Noorzaman, S.Si, MM.

NIDN: 0027117708

ABSTRAK

- Judul Penelitian** : Analisis Keuangan Sektor Publik Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017.
Ketua Peneliti : Wahjuny Djamaa, SE.Ak, M.Sc.
Anggota : Aris Adetias Saputra
Kata Kunci : Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi, Aktivitas, Pertumbuhan.

Prinsip ekonomi yang nyata dan bertanggung jawab merupakan pilar dari sistem otonomi di Indonesia. Prinsip otonomi yang nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintah dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Untuk mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara mandiri, efektif, efisien, transparan dan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis laporan keuangan 18 Kabupaten dan 9 Kota Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian berbentuk deskriptif kuantitatif dengan periode laporan keuangan selama lima tahun 2013-2017. Teknik pengambilan sampel dan pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan rasio kemandirian 18 Kabupaten dan 9 Kota dalam kriteria instruktif dengan kemampuan keuangan rendah sekali dengan perolehan rata-rata dari 27 daerah administratif sebesar 18,22%. Selanjutnya pada rasio efektivitas dan rasio efisiensi dari 18 Kabupaten dan 9 Kota dari 27 daerah administratif hanya satu daerah administratif yang menunjukkan kinerja keuangan yang baik antara efektivitas dan efisiensi yakni Kota Tasikmalaya dengan perolehan presentase sebesar 91% pada rasio efektivitas dan 90% pada rasio efisiensi dan tergolong dalam kriteria yang cukup. Adapun pada rasio belanja yaitu belanja rutin dan belanja pembangunan dari 18 Kabupaten dan 9 Kota menunjukkan 53% pada belanja rutin dan 47% pada belanja pembangunan, jika dari selisih kedua aktivitas belanja, 6% dari 27 daerah administratif lebih memprioritaskan pada belanja rutin dibandingkan belanja pembangunan. Dan pada rasio pertumbuhan dari 18 Kabupaten dan 9 Kota dalam segi pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan total pendapatan daerah hanya 30% yang mengalami kenaikan 22% mengalami penyusutan dan 48% berfluktuatif. Sedangkan dalam segi pertumbuhan belanja, belanja langsung lebih dominan dibandingkan dengan belanja tidak langsung dengan perolehan persentase 68% banding 32% dengan rata-rata kenaikan pertahun dalam kurun waktu lima tahun yaitu 29,39% pada pertumbuhan belanja langsung dan 13,64% pada pertumbuhan belanja tidak langsung.

ABSTRACT

Research of Title : *Financial Analysis of Public Sector of West Java Province in 2013-2017.*
Chief Researcher : Wahjuny Djamaa, SE.Ak, M.Sc.
Member : Aris Adetias Saputra
Keywords : *independence, effectiveness, efficiency, activity, growth.*

Real and responsible economic principles are the pillars of the autonomy system in Indonesia. The principle of real autonomy is a principle that to handle government affairs carried out based on duties, authorities and obligations that actually exist and have the potential to grow and develop in accordance with the potential and distinctiveness of the region. To realize real and responsible regional autonomy, regional financial management is needed that is able to control regional financial policies independently, effectively, efficiently, transparently and accountably. This study aims to analyze the financial statements of 18 regencies and 9 cities of West Java Province using independence ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio, activity ratio and growth ratio. The type of research used is quantitative descriptive research with a financial statement period of five years 2013-2017. The sampling and data collection techniques in this study used purposive sampling methods and secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) of West Java Province. The results showed the independence ratio of 18 districts and 9 cities in the instructive criteria with very low financial capacity with an average gain from 27 administrative regions of 18.22%. Furthermore, in the effectiveness ratio and efficiency ratio of 18 districts and 9 cities out of 27 administrative regions, only one administrative region showed good financial performance between effectiveness and efficiency, namely Tasikmalaya City with a percentage gain of 91% in the effectiveness ratio and 90% in the efficiency ratio and classified as sufficient criteria. As for the expenditure ratio, namely routine expenditure and development expenditure from 18 districts and 9 cities, it showed 53% in routine expenditure and 47% in development expenditure, if from the difference between the two shopping activities, 6% of 27 administrative regions prioritized routine spending over development spending. And in the growth ratio of 18 districts and 9 cities in terms of growth in Regional Original Income (PAD) and total regional revenue, only 30% experienced an increase of 22% depreciating and 48% fluctuating. Meanwhile, in terms of expenditure growth, direct spending is more dominant than indirect spending with a percentage gain of 68% to 32% with an average annual increase in five years, namely 29.39% in direct expenditure growth and 13.64% in indirect expenditure growth.

DAFTAR ISI

COVER	
LEMBAR PERJANJIAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Batasan Masalah	6
1.4. Rumusan Masalah	6
1.5. Tujuan Penelitian	7
1.6. Manfaat Penelitian	7
1.7. Sistematika Penulisan	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Akuntansi Keuangan Daerah	9
2.1.2 Akuntansi dan Laporan Keuangan Daerah	12
2.1.3 Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah	15
2.1.4 Analisis Rasio Keuangan Daerah	17
2.2. Penelitian Terdahulu	18
2.3. Kerangka Pemikiran	19
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian	21
3.2. Jenis Penelitian	21
3.3. Populasi dan Sampel Penelitian	22
3.3.1. Populasi	22
3.3.2. Sampel	22
3.4. Teknik Pengumpulan Data	23
3.5. Definisi Operasional Variabel	23
3.5.1. Rasio Kemandirian	24
3.5.2. Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi	25
3.5.3. Rasio Aktivitas	26
3.5.4. Rasio Pertumbuhan	27
3.6. Teknik Analisis Data	28
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian	30
4.1.1. Gambaran Umum Provinsi Jawa Barat	30
4.1.2. Analisis Data dan Hasil	33
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Simpulan	58

5.2. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Dalam waktu yang relatif singkat akuntansi Sektor Publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat ini terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh Lembaga-Lembaga Pemerintah Negara ataupun Daerah dan berbagai Sektor Publik lainnya dibandingkan dengan pada masa-masa sebelumnya. Terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas Publik oleh Lembaga-Lembaga Sektor Publik, dalam Pemerintah sendiri, sudah mulai ada perhatian yang lebih besar terhadap penilaian kelayakan praktik manajemen Pemerintah yang mencakup perlunya dilakukan perbaikan sistem akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan Pemerintah. Jika diamati secara lebih mendalam, akuntansi Sektor Publik memiliki peranan yang vital dan menjadi subyek untuk didiskusikan baik oleh kalangan Akademisi maupun Praktisi Sektor Publik.

Menurut Mardiasmo (2018:1) Organisasi Sektor Publik saat ini tengah menghadapi tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negative atas aktivitas yang dilakukan. Berbagai tuntutan tersebut menyebabkan akuntansi dapat dengan cepat diterima dan diakui sebagai ilmu yang dibutuhkan untuk mengelola urusan-urusan Publik. Akuntansi Sektor Publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain Publik. Domain Publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan Sektor Swasta. Secara kelembagaan, domain Publik antara lain meliputi Badan-Badan Pemerintah (Pemerintah Pusat dan Daerah serta unit kerja Pemerintah), perusahaan milik Negara (BUMN dan BUMD), Yayasan, Organisasi Politik dan Organisasi Massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Universitas dan Organisasi Nirlaba lainnya. (Mardiasmo, 2018:2)

Berbagai kritik mengenai peranan organisasi Sektor Publik dalam pembangunan telah mengalami perubahan yang dramatis. Pada 1950-an dan 1960-an Sektor Publik memainkan peran utama sebagai pembuatan dan pelaksanaan strategi pembangunan.

Istilah “Sektor Publik” mulai dipakai pertama kali pada tahun 1952. Pada waktu itu, Sektor Publik sering dikaitkan sebagai bagian dari manajemen ekonomi makro yang terkait dengan pembangunan dan lembaga pelaksana pembangunan. Pada tahun 1970-an, adanya kritikan dan serangan dari pendukung teori pembangunan radikal menunjukkan kesan ingin mempertanyakan kembali peran Sektor Publik dalam pembangunan. Benarkah Sektor Publik dapat menggerakkan dan mempertahankan pembangunan?, baru pada tahun 1980-an reformasi Sektor Publik dilakukan, berbagai perubahan dilakukan dengan mengadopsi pendekatan *New Publik Management* (NPM) dan *Reinventing government*. (Mardiasmo, 2018:20). Dengan adanya perubahan pada Sektor Publik tersebut, terjadi pula perubahan pada akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Sektor Publik kemudian mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Sebagai contoh adalah terjadinya perubahan sistem akuntansi dari akuntansi berbasis kas menjadi berbasis akrual. (Mardiasmo, 2018:21)

Menurut Tanjung (2015:2) Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang standar akuntansi Pemerintah berbasis akrual dalam kerangka konseptualnya menjelaskan ada dua entitas dalam pelaksanaan akuntansi pada Pemerintah yaitu:

“Entitas akuntansi dan entitas pelaporan, entitas akuntansi merupakan unit pada Pemerintah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. (SAP, kerangka konseptual, paragraf 21), sedangkan entitas pelaporan merupakan unit Pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggung jawaban, berupa laporan keuangan bertujuan umum. (SAP, kerangka konseptual, paragraf 22)”.

Lembaga Sektor Publik masih memiliki kesempatan yang luas untuk memperbaiki kinerjanya dan memanfaatkan sumber daya secara ekonomis, efisien, dan efektif. Memperbaiki kinerja Sektor Publik memang bukan sekedar masalah teknis belaka, akan tetapi akuntansi Sektor Publik sebagai alat untuk menciptakan *good public and corporate governance* memiliki peran yang sangat vital dan signifikan. (Mardiasmo, 2018:21). Dalam dua dasawarsa terakhir, telah terjadi perkembangan (Akuntansi) Sektor Publik yang pesat. Istilah Akuntabilitas Publik, *value for money*, reformasi Sektor Publik, privatisasi, *good public governance*, telah begitu cepat masuk ke dalam kamus Sektor Publik. Isu yang muncul dalam Sektor Publik merupakan suatu rangkaian yang akhirnya merupakan tuntutan diciptakannya *good public and corporate governance*. Isu tersebut

kemudian diikuti dengan munculnya isu-isu baru, misalnya tuntutan dilakukannya reformasi Sektor Publik yang berorientasikan pada pembentukan Organisasi Sektor Publik yang ekonomis, efisien, efektif, transparan, responsif, dan memiliki akuntabilitas Publik yang tinggi. (Mardiasmo, 2018:22) *Good governance* dapat di artikan sebagai cara mengelola urusan-urusan Publik, *World Bank* memberikan definisi *governance* sebagai “*The way state power is used in managing economic and sosial resources for development of society*”, sementara itu, *United nation development program* (UNDP) mendefinisikan *governance* sebagai “*the exercise of political, economic, and administratif authority to manage a nation’s affair at all levels*”. Dalam hal ini *World Bank* lebih menekankan pada cara Pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan keuangan Negara. (Mardiasmo, 2018:22) Pemberian otonomi Daerah di Indonesia memberikan tuntutan yang besar kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam rangka menciptakan *Good governance*. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 revisi UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban Daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal konsekuensi upaya nyata perwujudan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Daerah, pembangunan dan percepatan pertumbuhan ekonomi akan mengurangi kesenjangan antara Daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan Publik menjadi responsive dan efisien terhadap kebutuhan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk mengelola otonomi Daerahnya sendiri.

Menurut Haryanto *et al* (Istiyaningtias, 2017:2) Prinsip ekonomi yang nyata dan bertanggung jawab merupakan pilar dari sistem otonomi di Indonesia. Prinsip otonomi yang nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan Pemerintah dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan Daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap Daerah tidak selalu sama dengan Daerah lainnya. Untuk mewujudkan otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, diperlukan manajemen keuangan Daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan

Daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabilitas. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan melakukan kontrol terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena APBD merupakan pedoman dalam mengatur penerimaan dan belanja untuk pelaksanaan pembangunan Daerah. (Dewi, 2018:2) Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan Daerah tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang secara langsung ataupun tidak langsung menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai pelaksanaan kegiatan ataupun tugas Pemerintah, pembangunan dan pelayanan Sektor Publik. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dijelaskan (Dewi, 2018:2) sumber utama APBD adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan penerimaan yang diperoleh Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Mardiasmo (2018:86) perlu diketahui arti penting dan keterlibatan Pemerintah (termasuk juga Pemerintah Daerah) dalam proses penganggaran. Selanjutnya menurut Richard Musgrave (Mardiasmo 2018:86) mengidenifikasikan tiga pertimbangan ekonomis mengapa Pemerintah perlu “terlibat” dalam “bisnis” pengadaan barang dan jasa bagi masyarakat. Ketiga pertimbangan tersebut meliputi stabilisasi ekonomi, redistribusi pendapatan, dan alokasi sumber daya. Keterkaitan ketiga hal tersebut dikarenakan pada umumnya sektor swasta hanya menyediakan “*market goods*”, sedang Sektor Pemerintah pada umumnya berkewajiban menyediakan “*pure public goods*” dan “*partial public goods*”. Pertimbangan pertama dan kedua umumnya hanya dapat dilakukan Pemerintah pusat, sedangkan pertimbangan ketiga dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Atas ketiga pertimbangan itulah anggaran diperlukan untuk perencanaan dan pengendalian atas penerimaan dan pengeluaran dana dalam rangka pencapaian tujuan akhir Pemerintah. Pada dasarnya menurut Mardiasmo (2018:87) prinsip-prinsip dan mekanisme penganggaran relative tidak berbeda antara Sektor swasta dan Sektor Publik (Henley *et al*, 1990), yakni meliputi empat tahap yang terdiri atas :

1. Tahap persiapan anggaran (*preparation*)
2. Tahap retifikasi (*approval/ratification*)
3. Tahap implementasi (*implementation*), dan
4. Tahap pelaporan dan evaluasi (*reporting and evaluation*)

Tahap setelah operasionalisasi anggaran adalah pengukuran kinerja untuk menilai prestasi manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan Publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang Publik dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif. Pusat pertanggungjawaban berperan untuk menciptakan indikator kinerja sebagai dasar untuk menilai kinerja. Sistem pengukuran kinerja yang handal (*reliable*) merupakan salah satu faktor kunci suksesnya Organisasi. (Mardiasmo, 2018:151)

Berdasarkan *research gap* yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Keuangan Sektor Publik Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017.**

1.2 Identifikasi Masalah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan data realisasi merupakan laporan keuangan Pemerintah yang dapat dilihat dengan melakukan analisis rasio keuangan Daerah untuk melihat adakah kecenderungan yang terjadi dengan cara:

1. Menganalisis antara rasio keuangan Pemerintah Daerah tertentu dengan rasio keuangan Pemerintah Daerah lainnya.
2. Menganalisis hasil yang di capai dari satu periode dengan periode lainnya dengan analisis rasio keuangan, dan dapat juga dengan
3. Membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya dengan analisis rasio keuangan.

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini yang di identifikasi oleh penulis adalah pada point nomor 2 dengan menganalisis hasil yang di capai dari satu periode dengan periode lainnya dengan analisis rasio keuangan.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan ruang lingkup dalam penelitian ini dilakukan untuk mempermudah pemecahan masalah, oleh sebab itu penulis membatasi penelitian ini sebagai berikut :

1. Laporan keuangan yang diamati adalah laporan keuangan Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2017.
2. Laporan keuangan dalam penelitian ini hanya diukur dengan menggunakan rasio keuangan Daerah.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat di identifikasikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat rasio kemandirian keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017?
2. Bagaimana tingkat rasio efektivitas keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017?
3. Bagaimana tingkat rasio efisiensi keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017?
4. Bagaimana tingkat rasio aktivitas keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017?
5. Bagaimana tingkat rasio pertumbuhan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017?

1.5 Tujuan Penelitian

Dari rumusan di atas maka terbentuk beberapa tujuan, yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tingkat rasio kemandirian keuangan Provinsi Jawa Barat berdasarkan rasio keuangan Daerah tahun 2013-2017.
2. Untuk mengetahui tingkat rasio efektivitas keuangan Provinsi Jawa Barat berdasarkan rasio keuangan Daerah tahun 2013-2017.
3. Untuk mengetahui tingkat rasio efisiensi keuangan Provinsi Jawa Barat berdasarkan rasio keuangan Daerah tahun 2013-2017.
4. Untuk mengetahui tingkat rasio aktivitas keuangan Provinsi Jawa Barat berdasarkan rasio keuangan Daerah tahun 2013-2017.
5. Untuk mengetahui tingkat rasio pertumbuhan keuangan Provinsi Jawa Barat berdasarkan rasio keuangan Daerah tahun 2013-2017.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu :

1. Bagi Akademisi

Menjadi nilai tambah dalam informasi yang bermanfaat bagi pembaca dan sebagai bahan referensi atau acuan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik pada bidang kajian yang sama.

2. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan menjadi jawaban permasalahan yang ada dalam masyarakat khususnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas pada Sektor Publik sehingga masyarakat dapat menilai dan menyikapi permasalahan Daerah secara objektif.

3. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya di bidang akuntansi Sektor Publik.

1.7 Sistematika penulisan

Guna memahami lebih lanjut laporan ini dan memperjelas arah pembahasan maka skripsi ini disistematiskan menjadi beberapa subbab dengan uraian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan itu sendiri.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi serta beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi dan sample, teknik pengumpulan data, devinisi operasional variabel dan teknik analisis data penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran obyek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan yang secara lebih lengkap mengupas berbagai fenomena yang ada dalam penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi mengenai simpulan yang merupakan hasil akhir atas penelitian ini dan juga saran yang berisi masukan untuk pihak obyek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

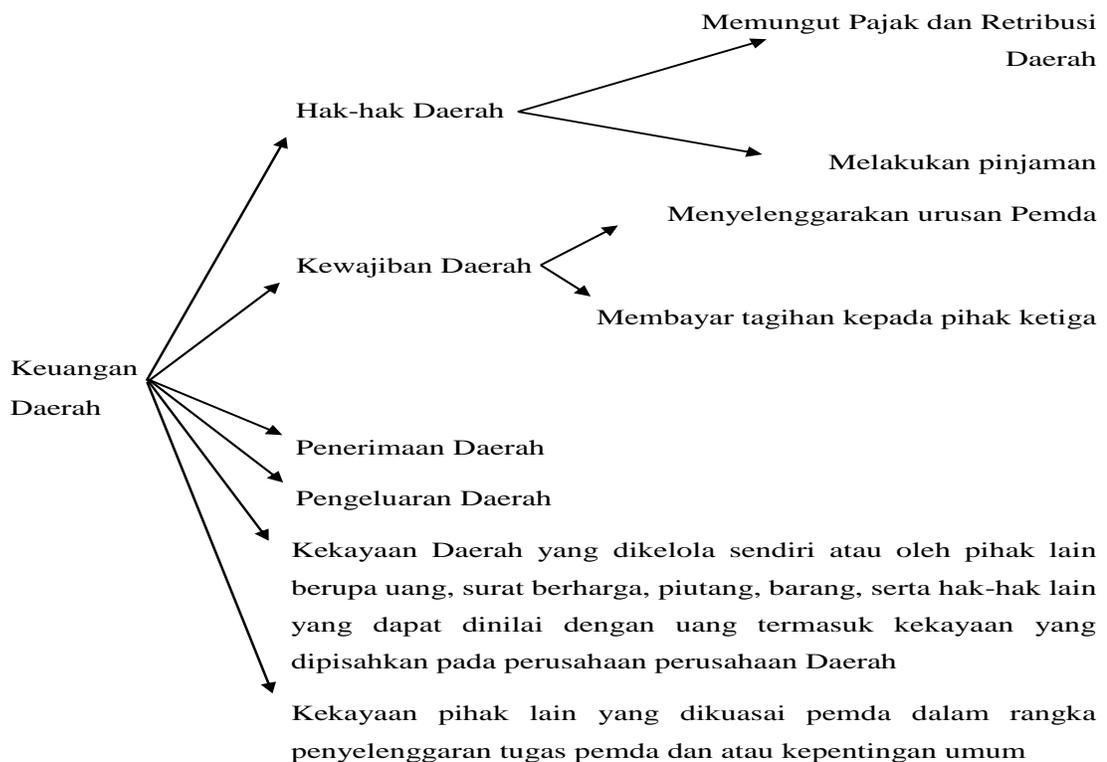
Berisi tentang berbagai buku, jurnal, rujukan yang secara sah digunakan dalam menyusun penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi keuangan Daerah didefinisikan sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan dari entitas Pemda dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak eksternal (Ratmono dan Mahfud, 2017:8), adapun dalam pemendagri Nomor 13 tahun 2006 disebutkan bahwa definisi keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya sebagai bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Dalam pasal 2 pemendagri Nomor 13 tahun 2006 disebutkan tentang ruang lingkup keuangan Daerah yang dapat di gambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Ruang Lingkup Keuangan Daerah

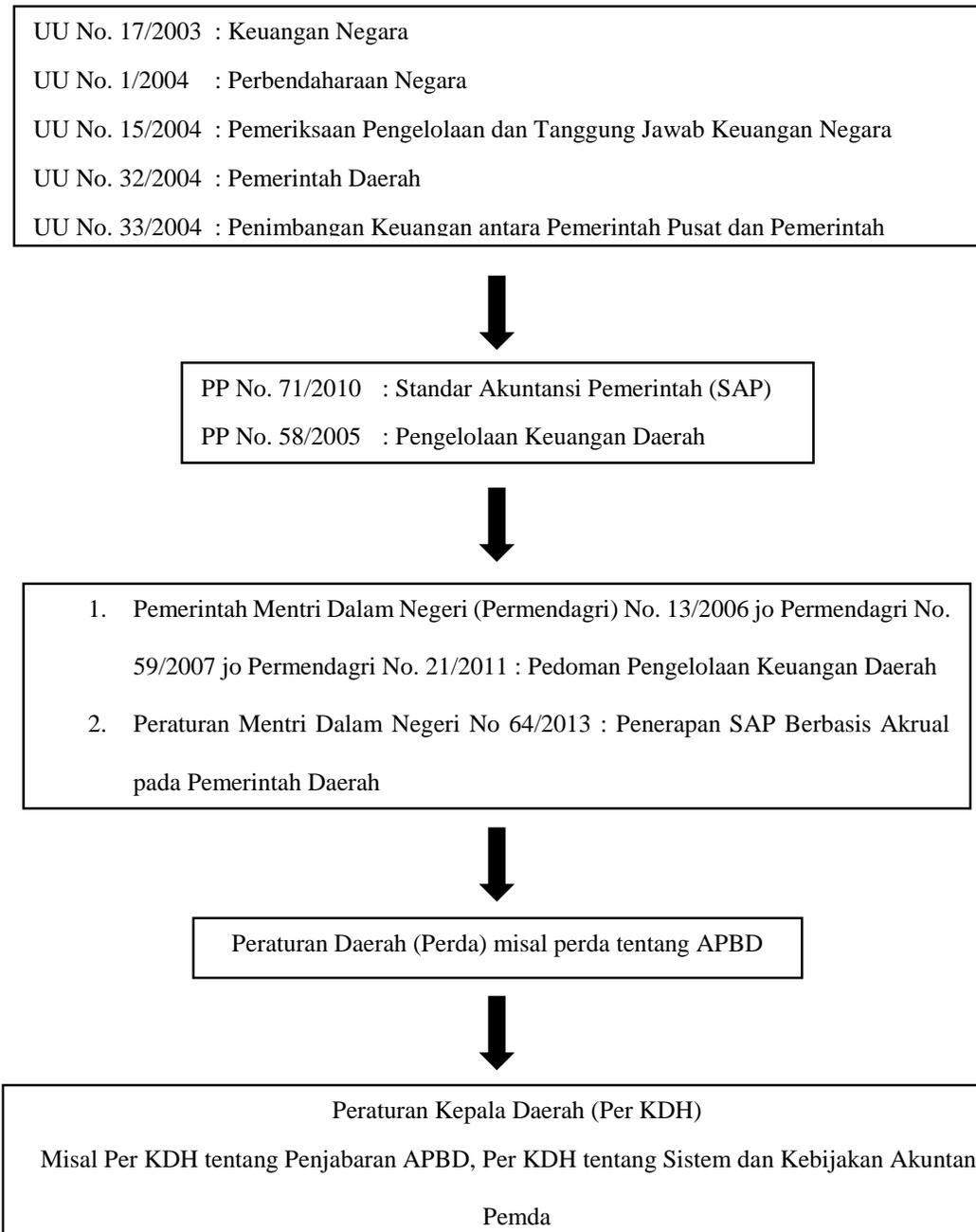
Sumber : Ratmono dan Mahfud, (2017:6)

Menurut Halim (Istiyaningtyas, 2017:16) Keuangan merupakan faktor yang paling mendominasi dalam pengukuran kemampuan Daerah untuk melaksanakan otonomi Daerah. Keuangan Daerah juga menjadi penentu bentuk dan ragam yang akan dilakukan Pemerintah Daerah. Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola Keuangan Daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) secara langsung maupun tidak langsung. Adapun menurut UU No.23 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik Daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Berdasarkan definisi tersebut terdapat 2 hal yang perlu dijelaskan menurut Halim (2014:25) , yaitu sebagai berikut :

1. Yang dimaksud semua hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan Daerah seperti pajak Daerah, retribusi Daerah, hasil perusahaan milik Daerah, ataupun hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sesuai peraturan yang diterapkan.
2. Semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan dana dalam rangka penyelenggaraan fungsi Pemerintah, infrastruktur, pelayanan umum dan pengembangan ekonomi.

Dalam Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dalam kerangka konseptualnya menjelaskan ada dua entitas dalam pelaksanaan akuntansi pada Pemerintah yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Selanjutnya, dalam struktur Pemerintah Daerah, satuan kerja perangkat Daerah (SKPKD) merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban menyelenggarakan akuntansi atas transaksi-transaksi pendapatan, belanja, aset dan selain kas yang terjadi di lingkungan satuan kerja. Satuan kerja ini dapat berupa badan pengelolaan keuangan Daerah (BPKD) atau banyak pada Pemerintah Daerah berupa dinas pendapatan dan pengelola keuangan dan aset Daerah (DPPKAD). (Tanjung, 2015:2)

Adapun dalam pengelolaan keuangan Daerah, Pemerintah Daerah harus mengacu dan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan tentang keuangan Negara yang ada di atasnya, seperti tampak dalam gambar berikut :



Gambar 2.2
Peraturan Perundangan-undangan
Tentang Pengelolaan dan Akuntansi Keuangan Daerah
Sumber : Ratmono dan Mahfud, 2017:5

Menurut Ratmono dan Mahfud (2017:1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah (*Local Government*) dapat dimasukkan dalam kategori organisasi *Type b non-profit*. Apa itu *Type b non-profit*?, yaitu merupakan organisasi non-laba yang memperoleh sumber daya finansial dalam jumlah yang signifikan dari sumber selain penjualan barang dan jasa. Sebagai contoh adalah Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal ini karena Pemerintah Daerah (PEMDA) memperoleh pendanaannya dari pajak, retribusi, hibah (*Grant*), dan pinjaman. Dalam penjelasan atas UU No 17 tahun 2003 disebutkan bahwa sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Negara sebagian kekuasaan Presiden dalam pengelolaan keuangan Negara diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku pengelola keuangan Daerah. (Ratmono dan Mahfud, 2017:5)

2.1.2. Akuntansi dan Laporan Keuangan Daerah

Akuntansi Sektor Publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas Publik. Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi (Mardiasmo, 2018:200). Menurut Mardiasmo (2018:200) organisasi Sektor Publik dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal, seperti laporan surplus/deficit, laporan realisasi anggaran, laporan rugi/laba, laporan aliran kas, neraca, serta laporan kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non finansial. Secara umum ada beberapa tujuan dan fungsi laporan keuangan Sektor Publik, menurut Mardiasmo (2018:201), yaitu :

1. Kepatuhan dan pengelolaan (*compliance and stewardship*)

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.

2. Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif (*accountability and retrospective reporting*)

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati *trend* antar kurun waktu, pencapaian atau tujuan

yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada. Laporan keuangan juga memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima, serta memungkinkan bagi mereka untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

3. Perencanaan dan informasi otorisasi (*planning and authorization information*)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otoritas penggunaan data.

4. Kelangsungan organisasi (*viability*)

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang.

5. Hubungan masyarakat (*public relation*)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemakai yang dipengaruhi, karyawan, dan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan Publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

6. Sumber fakta dan gambaran (*source of facts and figures*)

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

Adapun tujuan dan fungsi laporan keuangan bagi organisasi Pemerintah menurut Sujarweni (2015:90) yaitu :

1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan yang menyangkut ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan organisasi Pemerintah.
2. Untuk memeberikan informasi yang akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Menurut Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Daerah harus menyusun laporan keuangan. (sujarweni, 2015:92) Adapun menurut Tanjung (2015:82) dalam kerangka konseptual

paragraf 28 standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan komponen laporan keuangan pokok terdiri dari :

1. Laporan realisasi anggaran (LRA)
2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih (Laporan perubahan SAL)
3. Neraca
4. Laporan operasional (LO)
5. Laporan arus kas (LAK)
6. Laporan perubahan ekuitas (LPE)
7. Catatan atas laporan keuangan (CaLK)

Khusus pada SKPD, dari 7 laporan keuangan wajib dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, SKPD hanya menyusun laporan keuangan sebagai berikut (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013) :

1. Laporan realisasi anggaran (LRA)

Dalam PSAP BA 01 paragraf 35 (Tanjung, 2015:82) LRA merupakan laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah pusat/Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN / APBD. Dan PSAP BA 01 paragraf 38 (Tanjung, 2015:83) Dalam penyajian LRA baik pada tingkat Pemerintah Daerah maupun pada SKPD, LRA tersebut harus menggambarkan perbandingan-perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Selanjutnya dalam PSAP BA 02 paragraf 09 (Tanjung, 2015:83) menyatakan bahwa dalam LRA harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman pelaporan, jika dianggap perlu , informasi : nama entitas, cakupan entitas, periode yang dicakup, mata uang pelaporan, dan satuan angka yang digunakan.

2. Neraca

Dalam PSAP BA 01 paragraf 44 (Tanjung, 2015:84) menjelaskan bahwa neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca SKPD, aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya, sedangkan investasi jangka panjang dan dana cadangan tidak disajikan dalam neraca SKPD. Hal ini disebabkan investasi jangka Panjang dan dana cadangan merupakan aset-aset yang disajikan pada tingkat Pemerintah Daerah, dalam hal ini

pada neraca SKPKD. Begitu juga untuk kewajiban yang disajikan hanya kewajiban jangka pendek, sedangkan kewajiban jangka panjang tidak disajikan dalam neraca SKPKD. Dan kewajiban jangka panjang disajikan pada neraca SKPKD.

3. Laporan operasional (LO)

Manfaat disusunnya laporan operasional ini, yaitu tersedianya informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan, dan penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. PSAP BA 12 paragraf 7 (Tanjung, 2015:87) menyatakan laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun dalam PSAP BA 12 paragraf 12 (Tanjung, 2015:87) Dalam penyajian laporan operasional harus diidentifikasi secara jelas dan jika di anggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi: nama entitas atau identifikasi lainnya, cakupan entitas, periode yang dicakup, mata uang pelaporan, dan satuan angka yang digunakan.

4. Laporan perubahan ekuitas (LPE)

Dalam kerangka konseptual standar akuntansi Pemerintah berbasis akrual menjelaskan bahwa laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

PSAP BA 01 paragraf 83 (Tanjung, 2015:90) menjelaskan bahwa catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca dan laporan arus kas. Selain itu, catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan.

Secara umum menurut Ratmono dan mahfud (2017:13) Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 01 tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

2.1.3 Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja merupakan hasil kerja yang telah dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan tujuan untuk mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. (Sujarweni, 2015:107) Menurut Mardiasmo (2018:151) sistem pengukuran kinerja Sektor Publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer Publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment system*. Pengukuran kinerja Sektor Publik dilakukan untuk memenuhi 3 maksud, yaitu :

1. Pengukuran kinerja Sektor Publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja Pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu Pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas Organisasi Sektor Publik dalam pemberian pelayanan Publik.
2. Ukuran kinerja Sektor Publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Ukuran kinerja Sektor Publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggung jawaban Publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Menurut Istiyaningtias (2017:30) dalam melakukan pengukuran kinerja perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah, salah satu faktor tersebut adalah karakteristik Pemerintah Daerah, sedangkan akuntabilitas dapat terwujud salah satunya dengan cara melakukan pelaporan kinerja melalui laporan keuangan. Adapun menurut Mardiasmo (2018:160) *Value for money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi Pemerintah. Kinerja Pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Bahkan untuk beberapa hal perlu ditambahkan pengukuran distribusi dan cakupan layanan (*equity & service coverage*). Akan tetapi permasalahan yang sering dihadapi Pemerintah dalam melakukan pengukuran kinerja adalah sulitnya mengukur output, karena output yang dihasilkan tidak selalu berupa output yang berwujud, akan tetapi lebih banyak berupa *intangibile output*. Istilah “ukuran kinerja pada dasarnya berbeda dengan istilah “indikator kinerja”. Ukuran kinerja mengacu pada

penilaian kinerja secara langsung, sedangkan indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Peranan indikator kinerja menurut Mardiasmo (2018:164) adalah untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan. Hal ini tidak berarti bahwa suatu indikator akan memberikan ukuran pencapaian program yang definitive. Indikator *value for money* di bagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi)
2. Indikator kualitas pelayanan (efektivitas)

Indikator kinerja harus dapat dimanfaatkan oleh pihak internal maupun eksternal. Pihak internal dapat menggunakannya dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan serta efisiensi biaya. Dengan kata lain, indikator kinerja berperan untuk menunjukkan, memberikan indikasi atau memfokuskan perhatian pada bidang yang relevan dilakukan tindakan perbaikan. Sedangkan untuk pihak eksternal dapat menggunakan indikator kinerja sebagai kontrol dan sekaligus sebagai informasi dalam rangka mengukur tingkat akuntabilitas Publik. (Mardiasmo, 2018:164)

2.1.4. Analisis Rasio Keuangan Daerah

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan Daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah dengan melaksanakan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Menurut Halim dan Muhammad (2014:L3) Analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Penggunaan analisis rasio pada Sektor Publik khususnya terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perlu dilaksanakan meskipun kaidah akuntansi dalam Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berbeda dengan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan swasta. (Halim dan Muhammad, 2014:L4)

Analisis rasio keuangan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya, dan dapat juga dilakukan dengan menganalisis hasil yang dicapai dari satu periode ke periode berikutnya dalam kurung waktu yang tertentu, selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan Pemerintah Daerah tertentu dengan Pemerintah Daerah lainnya yang terdekat ataupun dengan potensi Daerah yang relatif sama, semua itu untuk menganalisis bagaimana rasio keuangan Pemerintah Daerah tersebut terhadap Pemerintah Daerah lainnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Analisis rasio keuangan ini merupakan konversi data dari laporan keuangan menjadi informasi yang bermanfaat untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah serta bagi pengambil keputusan. Dengan demikian, akuntansi berperan penting dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi organisasi Pemerintah bagi masyarakat.

2.2. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan rasio Keuangan telah banyak dilakukan, akan tetapi dari setiap penelitian terdapat ataupun memiliki variasi yang berbeda seperti penggunaan variabel independent, tahun penelitian, jumlah sampel yang digunakan, dan lain sebagainya. Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan rasio keuangan yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

PENELITI	JUDUL	VARIABEL	ANALISIS	HASIL
Dwijayanti, Rusherlistyanti (2013)	Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi se-Indonesia	Kinerja keuangan, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas, Rasio Pertumbuhan	Analisis Rasio Keuangan Analisis Uji Beda Kinerja Keuangan	Kinerja keuangan Pemerintah Daerah dalam bentuk kemandirian, efektivitas PAD, efisiensi, aktivitas dan pertumbuhan terdapat perbedaan tingkat yang signifikan pada masing-masing rasio keuangan pada kinerja

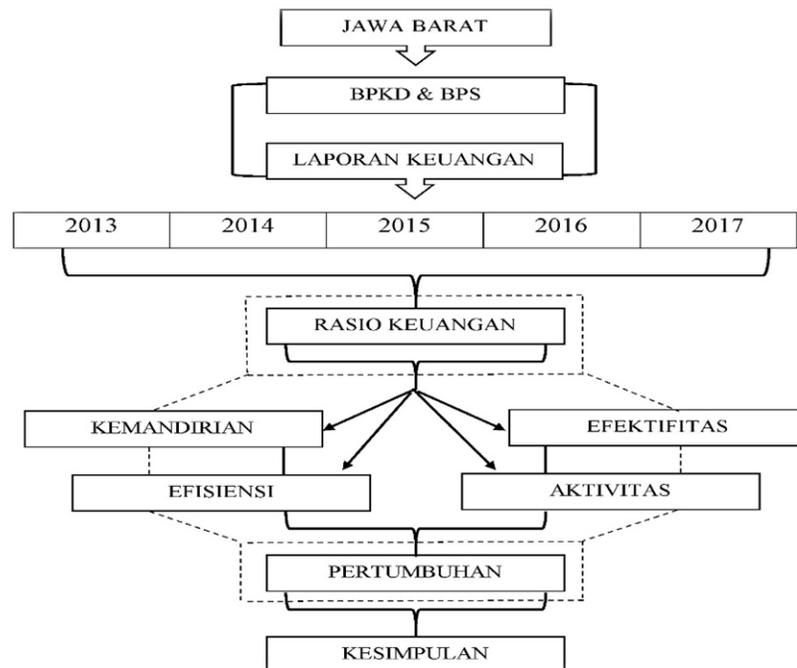
				keuangan terhadap beberapa Pemerintah Daerah Provinsi se-Indonesia Periode 2008-2010.
Kurniati, Siti (2012)	Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota se-Jawa Tengah Sebelum Dan Sesudah Krisis Ekonomi 2008	Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas, Rasio Kontribusi Pajak Daerah, Rasio Kontribusi Retribusi	Analisis Rasio Keuangan Uji normalitas data dan hipotesis <i>Paired Sample T Test</i> atau uji T sampel berpasangan Uji <i>statistic non parametik</i>	Kinerja keuangan dalam bentuk Efektivitas, Efisiensi, Aktivitas, dan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Daerah sesudah krisis ekonomi 2008 lebih rendah dibandingkan sebelum krisis ekonomi 2008 dan tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan Daerah dalam bentuk Kemandirian serta Kontribusi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Retribusi Daerah.
H.Mutiha, Arthaingan (2016)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010-2014	Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas dan Efisiensi, Rasio Belanja Langsung dan Tidak langsung, Rasio Pertumbuhan	Analisis Rasio Keuangan Deskriptif kuantitatif	Pola hubungan kemandirian menunjukkan pola hubungan konsultatif dimana peran pemerintah pusat masih lebih dominan dari pada pemerintah kota bogor. Sementara efektivitas kota bogor cukup baik atau efektif, melampaui target yang telah ditetapkan namun pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan total pendapatan masih relatif lebih kecil. Porsi belanja tidak langsung terhadap total pendapatan relatif lebih besar dibandingkan porsi belanja langsung terhadap total pendapatan Sementara itu

				pertumbuhan pendapatan dan belanja mengalami pertumbuhan yang positif.
--	--	--	--	--

Hasil dari penelitian-penelitian terdahulu dan penelitian yang telah dilakukan ini, terdapat beberapa kesamaan dalam pengambilan variabelnya. Hal tersebut dapat terlihat dari variabel yang diambil yaitu Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan. Namun terdapat beberapa perbedaan yang cukup signifikan dalam metode ataupun analisis data yang digunakan.

2.3. Kerangka Konseptual

Menurut Sambas Ali Muhidin (sambas.staf.upi.edu) Kerangka pemikiran adalah narasi (uraian) atau pernyataan (proposisi) tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Dan di bawah ini adalah gambaran kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini :



Gambar 2.3 Kerangka Konseptual Penelitian
Sumber: Penulis (2019)

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk laporan keuangan tahun 2013-2017, agar mempermudah penulis menentukan waktu penelitian, maka penulis membuat rencana kegiatan penelitian dalam tabel di bawah ini:

Table 3.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan	Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	■	■														
2	Bimbingan BAB I, II, III			■	■	■	■										
3	Seminar Proposal Penelitian									■	■	■	■				
4	Pengumpulan data													■	■	■	■
5	Pengolahan data													■	■	■	■
6	Bimbingan hasil penelitian																■
		Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
7	Seminar hasil penelitian, Sidang dan Komprehensif									■	■	■	■	■	■	■	■
8	Finalisasi																■

Sumber: Penulis (2019)

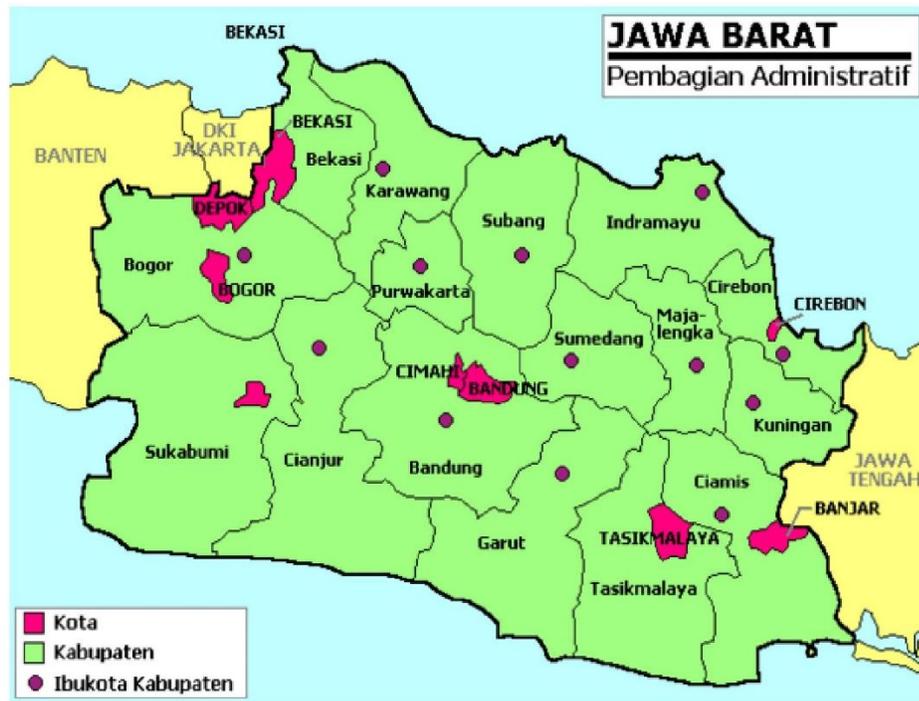
3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian berbentuk deskriptif kuantitatif dimana penelitian ini bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu atau mencoba menggambarkan fenomena secara detail. Dapat juga dikatakan bahwa penelitian deskriptif kuantitatif merupakan usaha sadar dan sistematis untuk memberikan jawaban terhadap suatu masalah dan atau menggunakan tahap-tahap penelitian dengan pendekatan kuantitatif dalam bentuk angka, dapat diukur, dan dilakukan perhitungan serta perlu ditafsirkan terlebih dahulu agar menjadi suatu informasi. (Mutih, 2016:111)

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Sujarweni (2014:65) populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di teliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 18 Kabupaten dan 9 Kota selama lima tahun.



Gambar 3.1 Daftar Kabupaten dan Kota Jawa Barat

Sumber: www.jabarprov.go.id

3.3.2 Sampel

Sampel menurut Sujarweni (2014:65) adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Dan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, menurut Sujarweni (2014:72) *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria

tertentu. Dan kriteria-kriteria yang digunakan untuk memilih sampel dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Laporan keuangan Provinsi Jawa Barat yang telah menyusun laporan keuangan antara tahun 2013-2017.
2. Laporan keuangan Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2017 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
3. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun 2013-2017 yang telah di Publikasikan melalui *website* resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) serta Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data dapat diartikan sebagai informasi yang diterima yang bentuknya dapat berupa fakta dan angka ataupun kata-kata dalam bentuk lisan ataupun tulisan lainnya yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun atau mengelola suatu informasi. Dan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Menurut Sugiyono, (2014:42) Data sekunder yaitu data yang tidak langsung berasal dari sumber datanya dimana biasanya data tersebut dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2017 yang diperoleh melalui website resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat.

3.5 Definisi Operasional Variabel

Menurut Sujarweni (2014:86) variabel penelitian adalah suatu *attribut* atau sifat atau nilai riil dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan di tarik kesimpulannya. Variabel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang diukur dengan menggunakan Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan.

3.5.1 Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama Pemerintah Pusat dan Provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi Masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi Masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan Masyarakat yang semakin tinggi. (Halim dan Muhammad, 2014:L5)

Tamboto *et all* (2014:758) menyatakan secara konsepsional, pola hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, harus dilakukan dengan kemampuan Daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Ada empat macam pola yang memperkenalkan hubungan situasional yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, antara lain:

- a. Pola Hubungan instruktif, peranan Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah.
- b. Pola Hubungan konsultatif, campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang, karena Daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.
- c. Pola Hubungan partisipatif, peran Pemerintah Pusat semakin berkurang mengingat Daerah bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- d. Pola Hubungan delegatif, campur tangan pemerintah pusat tidak ada karena Daerah telah benar-benar mampu mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Teori tersebut menunjukkan bahwa karena adanya potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berbeda, akan terjadi pula perbedaan pola hubungan tingkat kemandirian suatu Daerah. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan Daerah dengan kemampuan Daerah dari sisi keuangan dapat dikemukakan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2 Pola Hubungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	> 25-50	Konsultatif
Sedang	> 50-75	Partisipatif
Tinggi	> 75-100	Delegatif

Sumber: Dwijayanti dan Ruserlistyanti (2013:47)

3.5.2 Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi

Menurut Halim dan Muhammad (2014:L6) Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil Daerah. Kemampuan Daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar satu atau 100%. Namun demikian, semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan Daerah yang semakin baik. Sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan, maka kriteria Efektivitas kinerja keuangan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.3 Kriteria Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kriteria	Rasio Efektivitas (%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	100
Cukup Efektif	90-99
Kurang Efektif	75-89
Tidak Efektif	<75

Sumber: Dwijayanti dan Ruserlistyanti (2013:47)

Untuk memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektivitas perlu disandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai Pemerintah Daerah. Menurut Halim dan Muhammad (2014:L6) rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kemampuan Daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau 100%. Semakin kecil rasio

efisiensi berarti kinerja Pemerintah Daerah semakin baik. Adapun kriteria efisiensi penilaian kinerja keuangan sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4 Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah

Efisiensi Keuangan Daerah Otonomi dan Kemampuan Keuangan	Rasio Efisiensi (%)
Sangat efisien	≤ 60
Efisien	$>60-80$
Cukup Efisien	$>80-90$
Kurang Efisien	$>90-100$
Tidak Efisien	≥ 100

Sumber: Dwijayanti dan Ruserlistyanti (2013:48)

3.5.3 Rasio Aktivitas

Menurut Halim dan Muhammad (2014:L8) rasio aktivitas menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil dan demikian pula sebaliknya. Tidak ada pola hubungan ataupun kriteria pada rasio aktivitas, menurut Halim dan Muhammad (2014:L8) rasio aktivitas hanya menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja.

3.5.4 Rasio Pertumbuhan

Menurut Halim dan Muhammad (2014:L12) rasio pertumbuhan merupakan mengukur (*growth ratio*) seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan pada masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian.

. Guna menghindari terjadinya kesalahpahaman pengertian penafsiran konsep yang digunakan dalam analisis dan pembahasan, beberapa batasan dan pengertian dasar ataupun konsep operasional dan variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Ukuran
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan Pemerintah.	Instruktif 0%-25% Konsultatif >25%-50% Partisipatif >50%-75% Delegatif >75%-100%
Rasio Efektivitas Keuangan Daerah	Kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill Daerah.	Sangat Efektif >100% Efektif 100% Cukup Efektif 90%-99% Kurang Efektif 75%-89% Tidak Efektif <75%
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	Kemampuan menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.	Sangat Efisien ≤60% Efisien >60%-80% Cukup Efisien >80%-90% Kurang Efisien >90%-100% Tidak Efisien ≥100%
Rasio Aktivitas Keuangan Daerah	Kemampuan menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja.	<i>-Priority</i>
Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah	Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.	<i>-Growth ratio</i>

Sumber: Penulis (2019)

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis rasio keuangan digunakan untuk menganalisis keuangan Pemerintah Daerah dengan menghitung rasio keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan laporan realisasi tahun anggaran 2013-2017. Data-data yang telah dikumpulkan akan diolah sehingga bisa diambil kesimpulan sesuai dengan jenis uji yang akan digunakan nantinya. Pada akhir kesimpulan itulah nantinya akan diketahui bagaimana tingkat rasio keuangan 27 Daerah administratif Provinsi Jawa Barat dari satu periode ke periode berikutnya. Dan berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 3.6 Teknik Analisis Data

No	Variabel	Referensi	Formula
1	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Dwijayanti dan Ruserlistyanti (2013:46)	Rasio Kemandirian: $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$
2	Rasio Efektivitas Keuangan Daerah	Halim dan Muhammad (2014:L6)	Rasio Efektivitas: $\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan Potensi Riil Daerah}}$
3	Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	Dwijayanti dan Ruserlistyanti (2013:47)	Rasio Efisiensi: $\frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}}$
4	Rasio Aktivitas Keuangan Daerah	Mutiha (2016:110)	Rasio Belanja Rutin APBD: $\frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total Belanja Daerah}}$

			<p>Rasio Belanja Rutin Pembangunan APBD:</p> $\frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total Belanja Daerah}}$
5	Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah	Mutiha (2016:110)	<p>Rasio Pertumbuhan PAD:</p> $\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD Xn-Xn-1}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD Xn-1}}$ <p>Rasio Pertumbuhan Pendapatan:</p> $\frac{\text{Realisasi Pendapatan Xn-Xn-1}}{\text{Realisasi Pendapatan Xn-1}}$ <p>Rasio Pertumbuhan Belanja:</p> $\frac{\text{Ralisasi Belanja Xn-Xn-1}}{\text{Realisasi Belanja Xn-1}}$ <p>Keterangan:</p> <p>Xn = Tahun yang dihitung</p> <p>Xn-1 = Tahun Sebelumnya</p>

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Barat

Jawa Barat adalah sebuah Provinsi di Indonesia yang terletak di bagian barat Pulau Jawa. Secara geografis Jawa Barat berada di antara 5°50' - 7°50' lintang Selatan dan 104°48' Bujur Timur, dengan luas wilayah 35.222,18 km² atau sekitar 27,45% dari luas Pulau Jawa.

Secara administratif Provinsi Jawa Barat terdiri dari 18 Kabupaten dan 9 Kota yang terdiri 627 Kecamatan, 645 Kelurahan, dan 5.312 Desa.



Gambar 4.1 Logo Jawa Barat

Sumber: www.jabarprov.go.id

Dan berikut ini adalah gambaran rincian singkat dari 27 Daerah administratif Provinsi Jawa Barat yang tersusun dalam bentuk gambar tabel:

No.	Kabupaten/ Kota	Pusat pemerintahan	Bupati/ Wali Kota	Luas Wilayah (km ²) ^[1]	Jumlah Penduduk (2017) ^[1]	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Logo	Peta Lokasi
1	Kabupaten Bandung	Soreang	Daftar bupati Dadang M. Nasser	1.767,96	3.522.724	31	10/270		
2	Kabupaten Bandung Barat	Ngamprah	Daftar bupati Aa Umbara Sutisna	1.305,77	1.616.203	16	-/165		
3	Kabupaten Bekasi	Cikarang	Daftar bupati Eka Supria Atmaja (Plt.)	1.224,88	2.554.376	23	7/180		
4	Kabupaten Bogor	Cibinong	Daftar bupati Ade Munawaroh Yasin	2.710,62	4.246.307	40	19/416		
5	Kabupaten Ciamis	Ciamis	Daftar bupati ling Syam Arifin	1.414,71	1.228.294	27	7/258		
6	Kabupaten Cianjur	Cianjur	Daftar bupati Herman Suherman (Plt.)	3.840,16	2.246.663	32	6/354		
7	Kabupaten Cirebon	Sumber	Daftar bupati Dicky Saromi (Pj.)	984,52	2.099.089	40	12/412		
8	Kabupaten Garut	Tarogong Kidul	Daftar bupati Rudi Gunawan	3.074,07	2.210.017	42	21/421		
9	Kabupaten Indramayu	Indramayu	Daftar bupati Spendi	2.040,11	1.845.205	31	8/309		
10	Kabupaten Karawang	Karawang	Daftar bupati Cellica Nurrachadiana	1.652,20	2.110.476	30	12/297		
11	Kabupaten Kuningan	Kuningan	Daftar bupati Acep Purnama	1.110,56	1.132.610	32	15/361		
12	Kabupaten Majalengka	Majalengka	Daftar bupati Karna Sobahi	1.204,24	1.266.981	26	13/330		
13	Kabupaten Pangandaran	Parigi	Daftar bupati Jeje Wiradinata	1.010,00	406.898	10	-/93		
14	Kabupaten Purwakarta	Purwakarta	Daftar bupati Anne Ratna Mustika	825,74	912.708	17	9/183		
15	Kabupaten Subang	Subang	Daftar bupati Ruhimat	1.893,95	1.552.925	30	8/245		
16	Kabupaten Sukabumi	Palabuhanratu	Daftar bupati Marwan Hamami	4.145,70	2.523.992	47	5/381		

17	Kabupaten Sumedang	Sumedang	Daftar bupati	Dony Ahmad Munir	1.518,33	1.135.818	26	7/270		
18	Kabupaten Tasikmalaya	Singaparna	Daftar bupati	Ade Sugianto	2.551,19	1.713.677	39	-/351		
19	Kota Bandung	-	Daftar wali kota	Oded Muhammad Danial	167,67	2.404.589	30	151/-		
20	Kota Banjar	-	Daftar wali kota	Ade Uu Sukaesih	113,49	201.191	4	9/16		
21	Kota Bekasi	-	Daftar wali kota	Rahmat Effendi	206,61	2.409.083	12	56/-		
22	Kota Bogor	-	Daftar Wali kota	Bima Arya Sugiarto	118,50	1.005.012	6	68/-		
23	Kota Cimahi	-	Daftar wali kota	Ajay Muhammad Priatna	39,27	532.988	3	15/-		
24	Kota Cirebon	-	Daftar wali kota	Nasrudin Azis	37,36	325.767	5	22/-		
25	Kota Depok	-	Daftar wali kota	Idris Abdul Shomad	200,29	1.809.120	11	63/-		
26	Kota Sukabumi	-	Daftar wali kota	Achmad Fahmi	48,25	334.033	7	33/-		
27	Kota Tasikmalaya	-	Daftar wali kota	Budi Budiman	171,61	692.567	10	69/-		

Gambar 4.2 Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat

Sumber: www.jabarprov.go.id

4.1.2 Analisis Data dan Hasil

Analisis keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Adapun ukuran ataupun penilaian terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan Daerahnya yaitu dengan menggunakan beberapa rasio, yakni rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan. Dan berikut ini adalah hasil dari perhitungan rasio keuangan Daerah terhadap Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 18 Kabupaten dan 9 Kota dari tahun 2013-2017 :

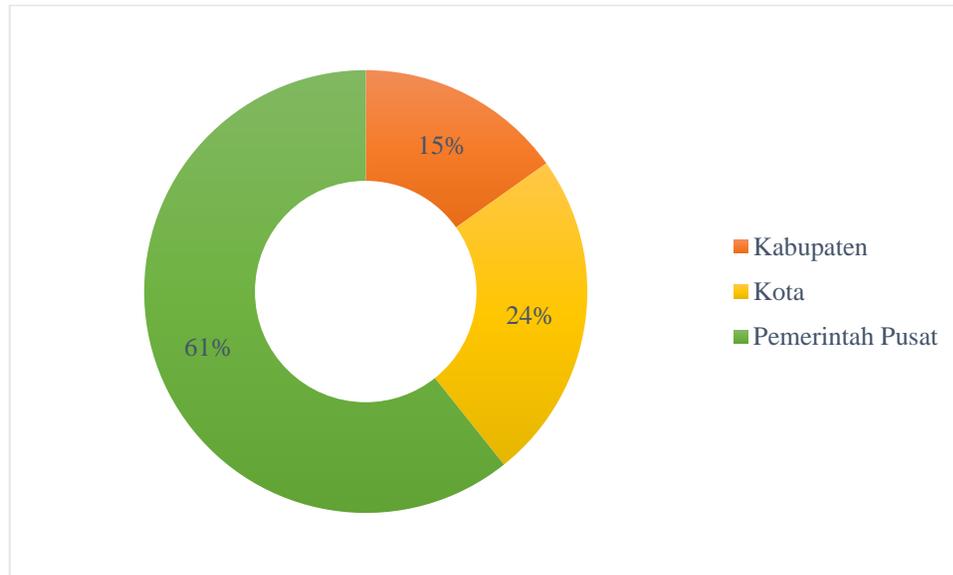
1. Rasio Kemandirian

Tabel 4.1
Rasio Kemandirian
Provinsi Jawa Barat 2013-2017 (Dalam Persen)

Keterangan	Tahun					Rata-rata	Klasifikasi
	2013	2014	2015	2016	2017		
Kabupaten Bogor	23.69	28.31	27.06	31.37	39.65	30	Rendah
Kabupaten Sukabumi	10.65	14.92	14.59	14.92	19.86	15	Rendah Sekali
Kabupaten Cianjur	11.08	14.47	13.72	13.04	13.85	13	Rendah Sekali
Kabupaten Bandung	13.80	15.72	15.23	16.68	18.08	16	Rendah Sekali
Kabupaten Garut	7.83	11.48	11.78	10.51	15.27	11	Rendah Sekali
Kabupaten Tasikmalaya	3.04	5.66	6.30	6.12	11.56	7	Rendah Sekali
Kabupaten Ciamis	5.00	8.41	7.37	8.23	8.76	8	Rendah Sekali
Kabupaten Kuningan	6.62	10.32	9.06	9.84	13.10	10	Rendah Sekali
Kabupaten Cirebon	10.49	16.19	14.17	14.10	14.21	14	Rendah Sekali
Kabupaten Majalengka	7.59	10.12	10.67	11.77	18.20	12	Rendah Sekali
Kabupaten Sumedang	10.42	13.65	13.02	13.56	20.63	14	Rendah Sekali
Kabupaten Indramayu	7.54	12.01	11.40	10.69	17.34	12	Rendah Sekali
Kabupaten Subang	7.36	10.97	12.07	12.55	12.47	11	Rendah Sekali
Kabupaten Purwakarta	12.28	17.68	18.19	17.99	21.79	18	Rendah Sekali
Kabupaten Karawang	20.70	25.09	25.80	24.84	31.35	26	Rendah Sekali
Kabupaten Bekasi	28.69	33.40	34.40	33.92	40.22	34	Rendah
Kabupaten Bandung Barat	10.15	12.01	14.46	14.99	21.10	15	Rendah Sekali
Kabupaten Pangandaran	-	5.01	15.63	6.31	7.24	9	Rendah Sekali
Kota Bogor	26.14	26.45	28.34	31.44	37.68	30	Rendah
Kota Sukabumi	20.74	24.86	23.34	23.01	27.68	24	Rendah Sekali
Kota Bandung	30.28	30.30	29.47	32.23	41.14	33	Rendah
Kota Cirebon	18.77	22.02	22.72	23.20	29.51	23	Rendah Sekali
Kota Bekasi	28.59	30.98	37.88	33.22	38.98	34	Rendah
Kota Depok	23.38	23.62	25.22	26.08	34.68	27	Rendah
Kota Cimahi	17.68	17.92	19.00	18.27	26.83	20	Rendah Sekali
Kota Tasikmalaya	12.21	14.92	6.92	13.36	18.01	13	Rendah Sekali
Kota Banjar	9.69	15.70	14.09	12.36	14.34	13	Rendah Sekali

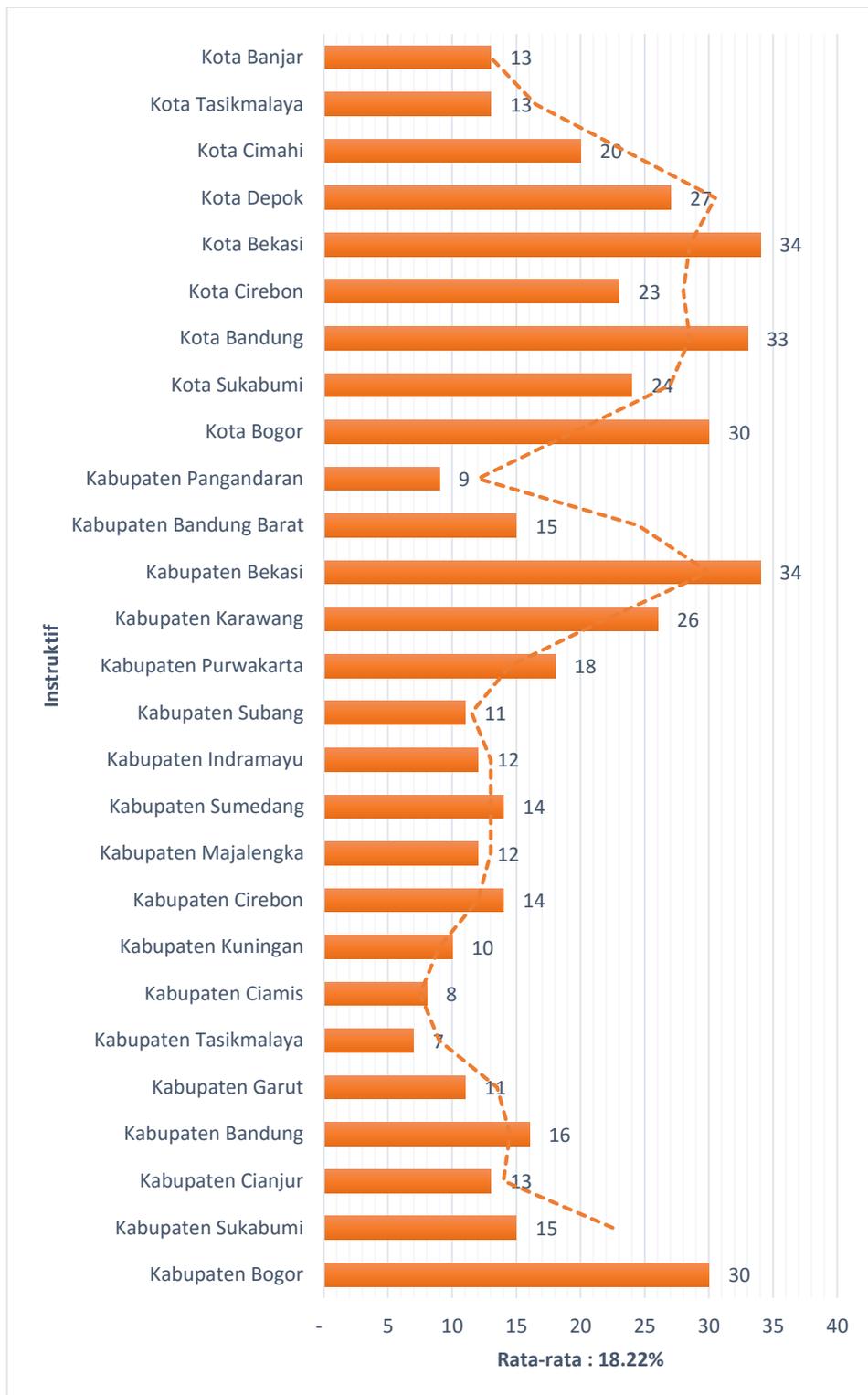
Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah)

Berdasarkan pada tabel 4.1 diatas, dapat dilihat rasio kemandirian keuangan Daerah pada Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2017 menunjukkan kriteria rendah sekali dimana dari 18 Kabupaten dan 9 Kota mayoritas lebih banyak memiliki pola hubungan Instruktif, yang diketahui bahwa tingkat kemandirian 27 Daerah administratif Provinsi Jawa Barat dalam membiayai kegiatan Pemerintahnya masih sangat bergantung pada Pemerintah Pusat.



Gambar 4.3 Diagram Kemandirian Provinsi Jawa Barat 2013-2017
Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah)

Pada tabel 4.1 Kabupaten Tasikmalaya merupakan Kabupaten yang memiliki tingkat kemandirian paling rendah, karena presentase kemandirian di Kabupaten Tasikmalaya <10%. Sedangkan untuk Kota, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar merupakan Kota yang memiliki tingkat kemandirian paling rendah dengan presentase <20%, walaupun jika dilihat dari presentase per periode yang dimana dari 18 Kabupaten dan 9 Kota dari 2013-2017 beberapa mengalami kenaikan, akan tetapi tingkat kemandirian Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat periode 2013-2017 dalam perhitungan kurung waktu lima tahun masih terbilang rendah sekali jika dilihat dari rata-rata 18 Kabupaten dan 9 Kota yang ditotal menjadi 27 Daerah administratif Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 18.22%.



Gambar 4.4
Presentase Kemandirian Provinsi Jawa Barat 2013-2017 (Dalam Persen)
 Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah)

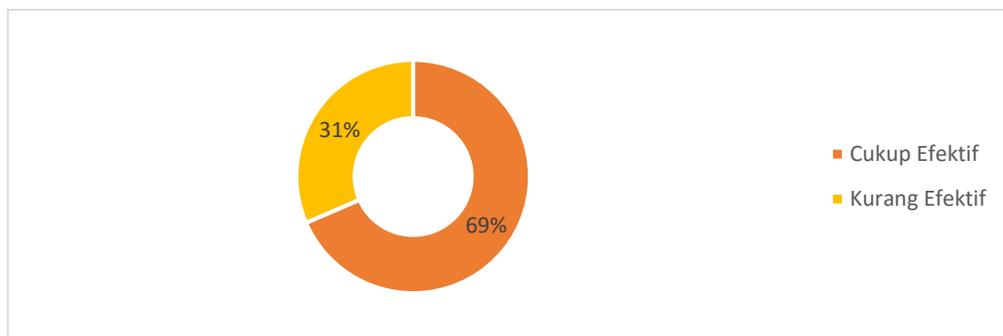
Jika dilihat dengan Pola hubungan presentasinya pada tabel 3.2 terletak antara 0-25% dengan demikian, rasio kemandirian Provinsi Jawa Barat yakni 18 Kabupaten dan 9 Kota tergolong dalam kategori kemandirian rendah sekali dengan pola hubungan Instruktif. Pola instruktif tersebut disebabkan karena rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah yakni kurang sadarnya masyarakat dalam hal membayar pajak serta rendahnya retribusi Daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah. Karena semakin rendah rasio kemandirian mengandung arti bahwa ketergantungan Daerah terhadap bantuan pihak *ekstern* terutama Pemerintah pusat dan Provinsi semakin tinggi, dan demikian pula sebaliknya.

2. Rasio Efektivitas

Tabel 4.2
Rasio Efektivitas
Provinsi Jawa Barat 2013-2017 (Dalam Persen)

Keterangan	Tahun					Rata-rata	Klasifikasi
	2013	2014	2015	2016	2017		
Kabupaten Bogor	85.88	88.88	84.34	81.59	90.92	86	Kurang Efektif
Kabupaten Sukabumi	93.84	96.05	91.96	92.51	93.14	93	Cukup Efektif
Kabupaten Cianjur	93.63	92.44	93.99	92.89	97.41	94	Cukup Efektif
Kabupaten Bandung	91.61	90.45	86.95	89.75	97.90	91	Cukup Efektif
Kabupaten Garut	89.17	96.87	96.35	98.76	97.06	96	Cukup Efektif
Kabupaten Tasikmalaya	95.49	94.19	89.50	90.97	94.58	93	Cukup Efektif
Kabupaten Ciamis	93.44	92.53	93.77	95.36	97.14	94	Cukup Efektif
Kabupaten Kuningan	95.60	96.49	93.86	93.85	97.36	95	Cukup Efektif
Kabupaten Cirebon	96.87	97.72	93.57	89.63	91.53	94	Cukup Efektif
Kabupaten Majalengka	95.41	93.28	93.79	91.49	95.13	94	Cukup Efektif
Kabupaten Sumedang	94.29	94.41	93.77	93.88	99.16	95	Cukup Efektif
Kabupaten Indramayu	91.52	94.37	94.65	95.29	98.49	95	Cukup Efektif
Kabupaten Subang	93.00	93.22	91.76	89.49	100.00	93	Cukup Efektif
Kabupaten Purwakarta	96.92	98.17	96.67	99.32	99.23	98	Cukup Efektif
Kabupaten Karawang	84.33	88.27	88.62	88.40	92.93	89	Kurang Efektif
Kabupaten Bekasi	83.57	84.69	84.38	80.91	86.86	84	Kurang Efektif
Kabupaten Bandung Barat	90.66	92.34	100.00	89.36	94.21	93	Cukup Efektif
Kabupaten Pangandaran	-	99.90	88.67	88.26	84.60	90	Kurang Efektif
Kota Bogor	88.83	85.33	86.40	86.34	88.22	87	Kurang Efektif
Kota Sukabumi	100.00	95.87	89.94	90.65	93.77	94	Cukup Efektif
Kota Bandung	90.92	87.46	80.78	85.12	91.51	87	Kurang Efektif
Kota Cirebon	92.02	91.03	99.70	87.75	92.41	93	Cukup Efektif
Kota Bekasi	87.35	89.46	99.89	84.51	100.00	92	Cukup Efektif
Kota Depok	77.29	79.12	75.88	70.28	81.56	77	Kurang Efektif
Kota Cimahi	90.03	87.84	83.90	77.85	100.00	88	Kurang Efektif
Kota Tasikmalaya	96.46	93.93	86.74	84.35	92.57	91	Cukup Efektif
Kota Banjar	85.15	89.03	86.42	86.58	92.77	88	Kurang Efektif

Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah)



Gambar 4.5 Diagram Efektivitas Provinsi Jawa Barat 2013-2017

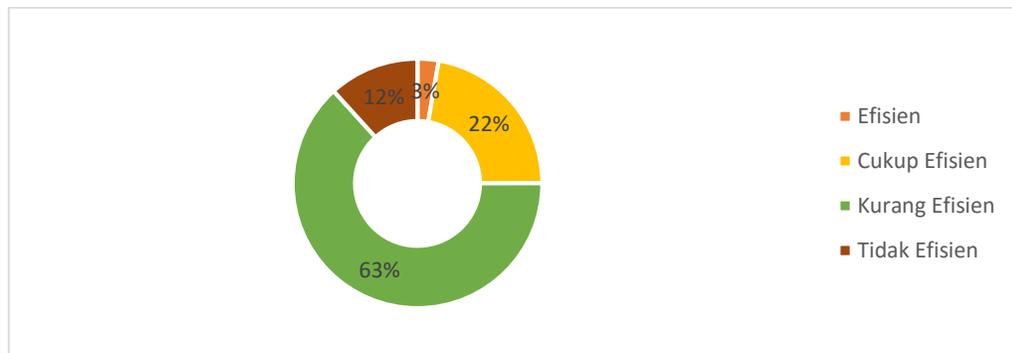
Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah)

3. Rasio Efisiensi

Tabel 4.3
Rasio Efisiensi
Provinsi Jawa Barat 2013-2017 (Dalam Persen)

Keterangan	Tahun					Rata-rata	Klasifikasi
	2013	2014	2015	2016	2017		
Kabupaten Bogor	86.67	80.97	66.14	88.19	89.63	82	Cukup Efisien
Kabupaten Sukabumi	95.15	90.53	91.75	92.07	91.27	92	Kurang Efisien
Kabupaten Cianjur	89.64	90.99	92.06	96.84	109.98	96	Kurang Efisien
Kabupaten Bandung	88.19	85.61	115.29	90.39	91.09	94	Kurang Efisien
Kabupaten Garut	95.43	93.60	99.69	96.37	109.74	99	Kurang Efisien
Kabupaten Tasikmalaya	93.40	88.70	92.46	94.56	112.62	96	Kurang Efisien
Kabupaten Ciamis	92.94	92.60	94.86	98.89	110.43	98	Kurang Efisien
Kabupaten Kuningan	95.54	91.79	93.07	98.72	114.05	99	Kurang Efisien
Kabupaten Cirebon	97.22	91.77	88.40	91.15	105.50	95	Kurang Efisien
Kabupaten Majalengka	92.01	91.16	89.86	93.53	107.63	95	Kurang Efisien
Kabupaten Sumedang	92.64	92.75	93.57	98.49	110.71	98	Kurang Efisien
Kabupaten Indramayu	91.47	93.29	94.39	97.96	99.22	95	Kurang Efisien
Kabupaten Subang	90.56	90.63	87.92	91.53	158.88	104	Tidak Efisien
Kabupaten Purwakarta	97.47	95.01	99.08	94.61	105.31	98	Kurang Efisien
Kabupaten Karawang	86.53	86.98	88.27	91.98	102.48	91	Cukup Efisien
Kabupaten Bekasi	81.41	81.17	78.68	86.64	91.97	84	Cukup Efisien
Kabupaten Bandung Barat	91.13	90.24	94.48	92.18	100.34	94	Kurang Efisien
Kabupaten Pangandaran	-	79.85	89.30	93.15	114.69	94	Kurang Efisien
Kota Bogor	80.24	82.67	84.13	84.85	86.58	84	Cukup Efisien
Kota Sukabumi	99.26	88.20	89.19	90.09	89.45	91	Cukup Efisien
Kota Bandung	84.53	78.31	82.43	730.26	88.43	213	Tidak Efisien
Kota Cirebon	88.86	88.01	96.21	93.49	93.74	92	Kurang Efisien
Kota Bekasi	87.27	79.88	98.19	99.19	105.83	94	Kurang Efisien
Kota Depok	75.76	72.08	67.14	77.88	76.54	74	Efisien
Kota Cimahi	85.13	81.98	76.00	86.77	79.40	82	Cukup Efisien
Kota Tasikmalaya	92.61	85.71	82.66	92.67	94.10	90	Cukup Efisien
Kota Banjar	88.63	84.71	85.16	93.28	90.00	88	Cukup Efisien

Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah)



Gambar 4.6 Diagram Efisiensi Provinsi Jawa Barat 2013-2017

Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah)

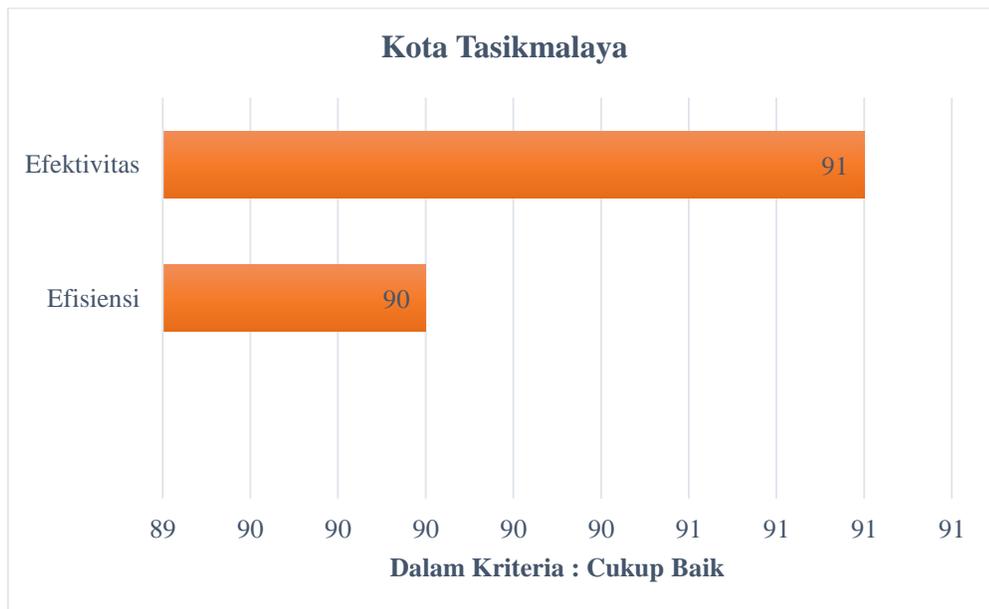
Tabel 4.2 dan tabel 4.3 yaitu rasio efektivitas dan rasio efisiensi, pada ke dua tabel ini terdapat hubungan satu sama lain dikarenakan rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan, adapun kemampuan tersebut guna mendapatkan hasil yang lebih baik perlu dipersandingkan dengan rasio efisiensi, sebab rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Dan berikut ini adalah tabel dari perhitungan rata-rata kedua rasio yang disajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 4.4
Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi
Provinsi Jawa Barat 2013-2017 (Dalam Persen)

Keterangan	Efektivitas		Efisiensi	
	Rata-rata	Klasifikasi	Rata-rata	Klasifikasi
Kabupaten Bogor	86	Kurang Efektif	82	Cukup Efisien
Kabupaten Sukabumi	93	Cukup Efektif	92	Kurang Efisien
Kabupaten Cianjur	94	Cukup Efektif	96	Kurang Efisien
Kabupaten Bandung	91	Cukup Efektif	94	Kurang Efisien
Kabupaten Garut	96	Cukup Efektif	99	Kurang Efisien
Kabupaten Tasikmalaya	93	Cukup Efektif	96	Kurang Efisien
Kabupaten Ciamis	94	Cukup Efektif	98	Kurang Efisien
Kabupaten Kuningan	95	Cukup Efektif	99	Kurang Efisien
Kabupaten Cirebon	94	Cukup Efektif	95	Kurang Efisien
Kabupaten Majalengka	94	Cukup Efektif	95	Kurang Efisien
Kabupaten Sumedang	95	Cukup Efektif	98	Kurang Efisien
Kabupaten Indramayu	95	Cukup Efektif	95	Kurang Efisien
Kabupaten Subang	93	Cukup Efektif	104	Tidak Efisien
Kabupaten Purwakarta	98	Cukup Efektif	98	Kurang Efisien
Kabupaten Karawang	89	Kurang Efektif	91	Cukup Efisien
Kabupaten Bekasi	84	Kurang Efektif	84	Cukup Efisien
Kabupaten Bandung Barat	93	Cukup Efektif	94	Kurang Efisien
Kabupaten Pangandaran	90	Kurang Efektif	94	Kurang Efisien
Kota Bogor	87	Kurang Efektif	84	Cukup Efisien
Kota Sukabumi	94	Cukup Efektif	91	Cukup Efisien
Kota Bandung	87	Kurang Efektif	213	Tidak Efisien
Kota Cirebon	93	Cukup Efektif	92	Kurang Efisien
Kota Bekasi	92	Cukup Efektif	94	Kurang Efisien
Kota Depok	77	Kurang Efektif	74	Efisien
Kota Cimahi	88	Kurang Efektif	82	Cukup Efisien
Kota Tasikmalaya	91	Cukup Efektif	90	Cukup Efisien
Kota Banjar	88	Kurang Efektif	88	Cukup Efisien

Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah)

Dari 18 Kabupaten dan 9 Kota dari periode 2013-2017 untuk rasio efektivitas dari presentase 100% hanya 69% yang bisa dikriteriakan cukup efektif dengan perolehan <99%, sedangkan untuk rasio efisiensi dari 18 Kabupaten dan 9 Kota dari presentase 100% hanya 3% yang bisa dikriteriakan efisien yaitu Kota Depok dengan perolehan >60% dan 22% dikriteriakan cukup efisien dengan perolehan <90%. Akan tetapi dari 18 Kabupaten dan 9 Kota dari periode 2013-2017 pada rasio efektivitas sebanyak 31% dikriteriakan kurang efektif dengan perolehan <89%, sedangkan pada rasio efisiensi dari 18 Kabupaten dan 9 Kota sebanyak 63% dikriteriakan kurang efisien dengan perolehan >90% dan 12% lainnya tidak efisien yakni Kabupaten Subang dan Kota Bandung dengan perolehan $\geq 100\%$. Jika dilihat berdasarkan tabel 4.4 dari 18 Kabupaten dan 9 Kota untuk Kota Depok, Daerah administratif ini memperoleh efisiensi yang cukup baik dengan presentase >60% akan tetapi kurang dalam memperoleh efektivitas dengan presentase <80% dan itu tidak menunjukkan kinerja yang baik, hanya satu Daerah administratif yang menunjukkan kinerja yang baik antara efektivitas dengan efisiensi yakni Kota Tasikmalaya dengan presentase 91% dalam melakukan efektivitas sedangkan efisiensinya berkisar 90% dan tergolong dalam kriteria cukup baik.



Gambar 4.7
Presentase Efektivitas dan Efisiensi Kota Tasikmalaya 2013-2017 (Dalam Persen)
 Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah)

Jika dilihat dari 27 Daerah administratif hanya satu Daerah administratif yang bisa di kriteriakan cukup baik dalam rasio efektivitas dengan rasio efisiensi, disini terlihat bahwa 26 Daerah administratif Provinsi Jawa Barat masih kurang dalam hal merealisasikan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) dengan perhitungan yang kurang cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterima dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil Daerah. Hal itu terlihat meskipun Daerah administratif berhasil merealisasikan penerimaan pendapatannya sesuai dengan target yang ditetapkan, namun apabila biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar dari pada realisasi pendapatan yang diterimanya sama saja pencapaian yang kurang efektif dan efisien dalam arti kurang memiliki keberhasilan.

4. Rasio Aktivitas

Tabel 4.5
Rasio Aktivitas (Belanja Tidak Langsung)
Provinsi Jawa Barat 2013-2017 (Dalam Persen)

Keterangan	Tahun					Rata-rata
	2013	2014	2015	2016	2017	
Kabupaten Bogor	38.91	36.97	35.15	42.06	47.88	40
Kabupaten Sukabumi	50.97	47.28	50.19	50.97	46.69	49
Kabupaten Cianjur	59.78	55.82	55.90	56.08	69.04	59
Kabupaten Bandung	52.74	49.20	75.72	52.31	50.14	56
Kabupaten Garut	53.35	53.04	83.42	56.50	70.19	63
Kabupaten Tasikmalaya	61.06	57.76	63.95	58.25	79.01	64
Kabupaten Ciamis	64.54	62.58	58.19	62.08	81.81	66
Kabupaten Kuningan	64.89	61.11	57.41	63.32	79.94	65
Kabupaten Cirebon	59.70	53.92	53.60	53.38	65.62	57
Kabupaten Majalengka	55.41	50.77	48.47	71.09	73.88	60
Kabupaten Sumedang	58.52	53.76	51.47	62.53	69.53	59
Kabupaten Indramayu	52.01	47.59	51.61	54.15	39.46	49
Kabupaten Subang	62.06	54.60	53.96	57.78	120.28	70
Kabupaten Purwakarta	62.81	55.86	56.92	56.62	69.11	60
Kabupaten Karawang	41.70	43.62	42.38	47.38	52.59	46
Kabupaten Bekasi	32.57	34.83	33.41	41.18	48.23	38
Kabupaten Bandung Barat	55.44	54.12	55.42	55.34	66.43	57
Kabupaten Pangandaran	-	60.93	48.51	53.58	67.68	58
Kota Bogor	42.86	37.86	39.45	36.29	44.28	40
Kota Sukabumi	52.10	44.14	40.98	39.37	39.99	43
Kota Bandung	44.41	41.31	37.77	38.27	42.91	41
Kota Cirebon	47.67	43.62	44.02	39.93	40.93	43
Kota Bekasi	36.15	34.57	36.24	34.79	54.77	39
Kota Depok	27.75	26.88	26.63	26.46	35.19	29
Kota Cimahi	45.40	41.24	37.19	38.81	20.74	37
Kota Tasikmalaya	51.05	47.34	49.51	46.79	45.37	48
Kota Banjar	38.75	39.70	38.61	41.37	43.07	40

Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah)

Dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Belanja Tidak Langsung} : \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

Sumber: Mutiha (2016:110)

Tabel 4.6
Rasio Aktivitas (Belanja Langsung)
Provinsi Jawa Barat 2013-2017 (Dalam Persen)

Keterangan	Tahun					Rata-rata
	2013	2014	2015	2016	2017	
Kabupaten Bogor	47.75	44.01	31.00	46.13	41.75	42
Kabupaten Sukabumi	44.18	43.27	41.56	41.11	44.59	43
Kabupaten Cianjur	29.86	35.18	36.16	40.77	40.94	37
Kabupaten Bandung	35.46	36.42	39.57	38.08	40.95	38
Kabupaten Garut	42.08	40.56	16.27	39.87	39.57	36
Kabupaten Tasikmalaya	32.31	30.95	28.51	36.31	33.61	32
Kabupaten Ciamis	28.40	30.02	36.67	36.81	28.62	32
Kabupaten Kuningan	30.65	30.68	35.66	35.40	34.11	33
Kabupaten Cirebon	37.52	37.85	34.81	37.78	39.88	38
Kabupaten Majalengka	36.60	40.39	41.38	22.44	33.75	35
Kabupaten Sumedang	34.12	38.99	42.11	35.96	41.18	38
Kabupaten Indramayu	39.46	45.70	42.78	46.95	45.07	44
Kabupaten Subang	28.49	36.02	33.96	33.75	38.60	34
Kabupaten Purwakarta	34.66	39.34	42.16	37.99	36.20	38
Kabupaten Karawang	44.83	43.35	45.88	44.61	49.79	46
Kabupaten Bekasi	48.84	46.34	45.27	45.46	43.73	46
Kabupaten Bandung Barat	35.70	36.12	39.06	36.84	33.92	36
Kabupaten Pangandaran	-	18.92	40.79	39.57	47.02	37
Kota Bogor	37.38	44.81	44.68	48.56	42.30	44
Kota Sukabumi	47.16	44.06	48.21	50.71	49.46	48
Kota Bandung	40.12	37.00	44.66	691.99	45.31	172
Kota Cirebon	41.20	44.39	52.20	53.55	52.81	49
Kota Bekasi	51.11	45.31	61.96	64.40	51.06	55
Kota Depok	48.01	45.20	40.51	51.42	41.35	45
Kota Cimahi	39.73	40.75	38.80	47.97	58.65	45
Kota Tasikmalaya	41.56	38.37	33.15	45.88	48.73	42
Kota Banjar	49.88	45.01	46.55	51.91	46.94	48

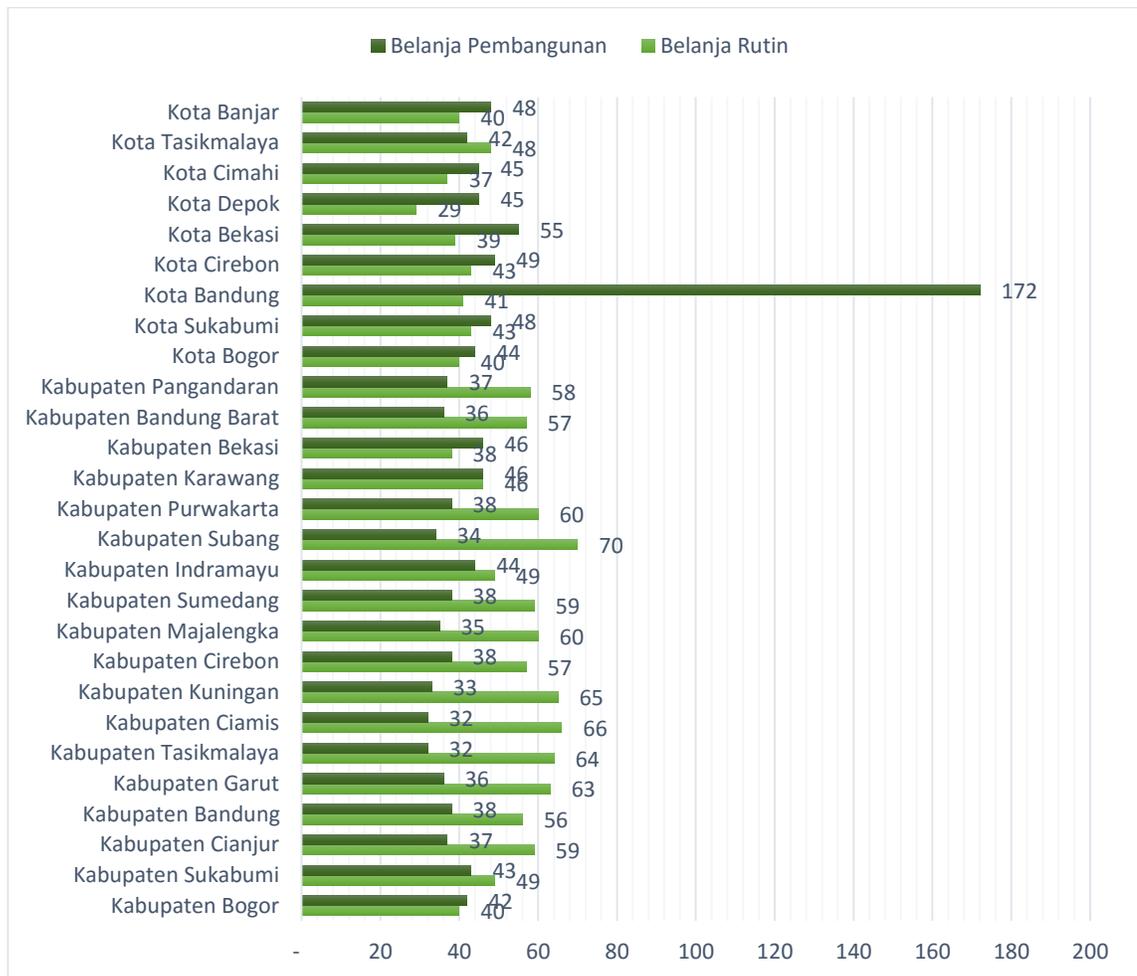
Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah)

Dengan rumus sebagai berikut:

Belanja Langsung :	$\frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total Belanja Daerah}}$
---------------------------	--

Sumber: Mutiha (2016:110)

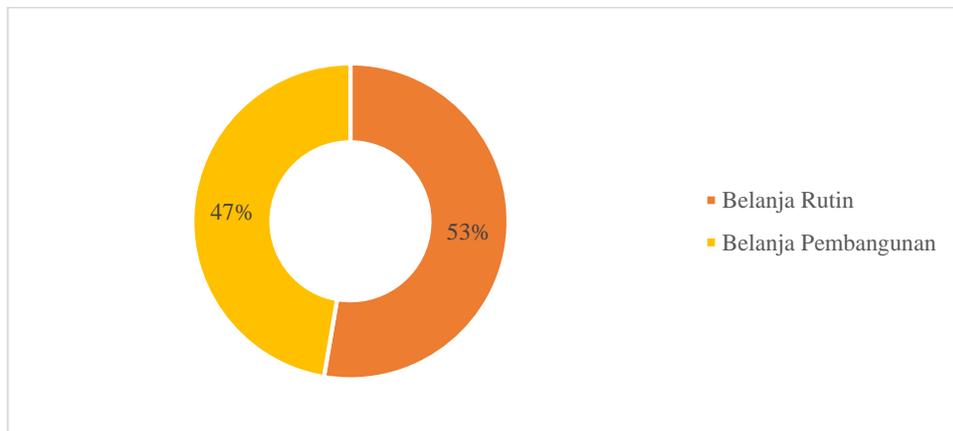
Pada rasio aktivitas terlampir dua tabel yakni tabel 4.5 belanja tidak langsung dan tabel 4.6 belanja langsung, agar terlihat bagaimana Daerah administratif Provinsi Jawa Barat memprioritaskan alokasi dananya terhadap aktivitas khusus nya dalam segi belanja maka dari ke dua tabel 4.5 dan tabel 4.6 di hitung secara rata-rata selama lima periode yakni 2013-2017 seperti yang terlampir pada gambar berikut ini:



Gambar 4.8
Presentase Aktivitas Provinsi Jawa Barat 2013-2017 (Dalam Persen)
 Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah)

Berdasarkan Gambar 4.8 dapat dilihat tahun 2013-2017 rata-rata belanja pembangunan yang lebih besar dari belanja rutin adalah Kota Banjar, Kota Cimahi, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Cirebon, Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Bogor.

Dari beberapa Daerah tersebut yang rata-rata belanja pembangunan yang lebih besar dibandingkan belanja rutin, yakni Kota Bandung dengan rata-rata yaitu sebesar 172% belanja pembangunan dibandingkan belanja rutin yang hanya sebesar 41%, sedangkan untuk Daerah yang rata-rata biaya rutinnya lebih besar dibandingkan belanja pembangunan adalah Kota Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi. Dari beberapa daerah tersebut yang rata-rata belanja rutinnya lebih besar dibandingkan belanja pembangunan yakni Kabupaten Subang dengan rata-rata yaitu sebesar 70% belanja rutin dibandingkan belanja pembangunan yang hanya sebesar 34%.



Gambar 4.9 Diagram Aktivitas Provinsi Jawa Barat 2013-2017
 Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah)

Berdasarkan diagram 4.9 terlihat dari rata-rata 27 Daerah administratif antara belanja rutin dan belanja pembangunan mayoritas dari 18 Kabupaten dan 9 Kota lebih pada belanja rutin dengan perolehan sebesar 53% di bandingkan dengan belanja pembangunan dengan perolehan hanya sebesar 47%. Maka, dari periode 2013-2017 Daerah administratif Provinsi Jawa Barat sebagian besar dana yang dimiliki dari 18 Kabupaten dan 9 kota dalam segi aktivitas belanja sebesar 6% lebih memprioritaskan untuk kebutuhan belanja rutin.

5. Rasio Pertumbuhan

Tabel 4.7
Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Provinsi Jawa Barat 2013-2017 (Dalam Persen)

Keterangan	Tahun				Rata-rata
	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	
Kabupaten Bogor	35.84	11.16	20.78	32.26	25
Kabupaten Sukabumi	67.14	11.47	7.74	45.65	33
Kabupaten Cianjur	54.66	10.47	0.12	17.59	21
Kabupaten Bandung	38.40	11.70	9.22	0.28	15
Kabupaten Garut	55.12	12.31	(4.49)	72.06	34
Kabupaten Tasikmalaya	118.88	20.90	15.95	87.92	61
Kabupaten Ciamis	55.20	(1.11)	13.56	8.88	19
Kabupaten Kuningan	80.31	12.96	14.42	32.32	35
Kabupaten Cirebon	80.51	5.72	10.52	5.43	26
Kabupaten Majalengka	56.57	27.17	16.84	54.97	39
Kabupaten Sumedang	59.17	8.47	5.63	59.99	33
Kabupaten Indramayu	87.80	5.72	1.24	64.47	40
Kabupaten Subang	81.72	20.38	14.07	(34.93)	20
Kabupaten Purwakarta	65.05	15.44	3.03	38.51	31
Kabupaten Karawang	37.58	16.21	(5.03)	39.36	22
Kabupaten Bekasi	34.06	19.13	4.01	20.54	19
Kabupaten Bandung Barat	32.87	26.51	19.58	62.12	35
Kabupaten Pangandaran	-	455.03	(63.17)	77.77	157
Kota Bogor	17.58	15.19	24.90	24.74	21
Kota Sukabumi	47.73	7.11	6.65	21.60	21
Kota Bandung	18.94	8.37	15.76	19.77	16
Kota Cirebon	44.91	7.15	13.51	22.26	22
Kota Bekasi	24.29	24.25	12.62	4.21	16
Kota Depok	13.41	24.13	12.75	31.24	20
Kota Cimahi	18.97	17.93	6.41	34.21	19
Kota Tasikmalaya	46.60	(53.45)	115.76	39.41	37
Kota Banjar	67.92	1.04	(2.93)	7.85	18

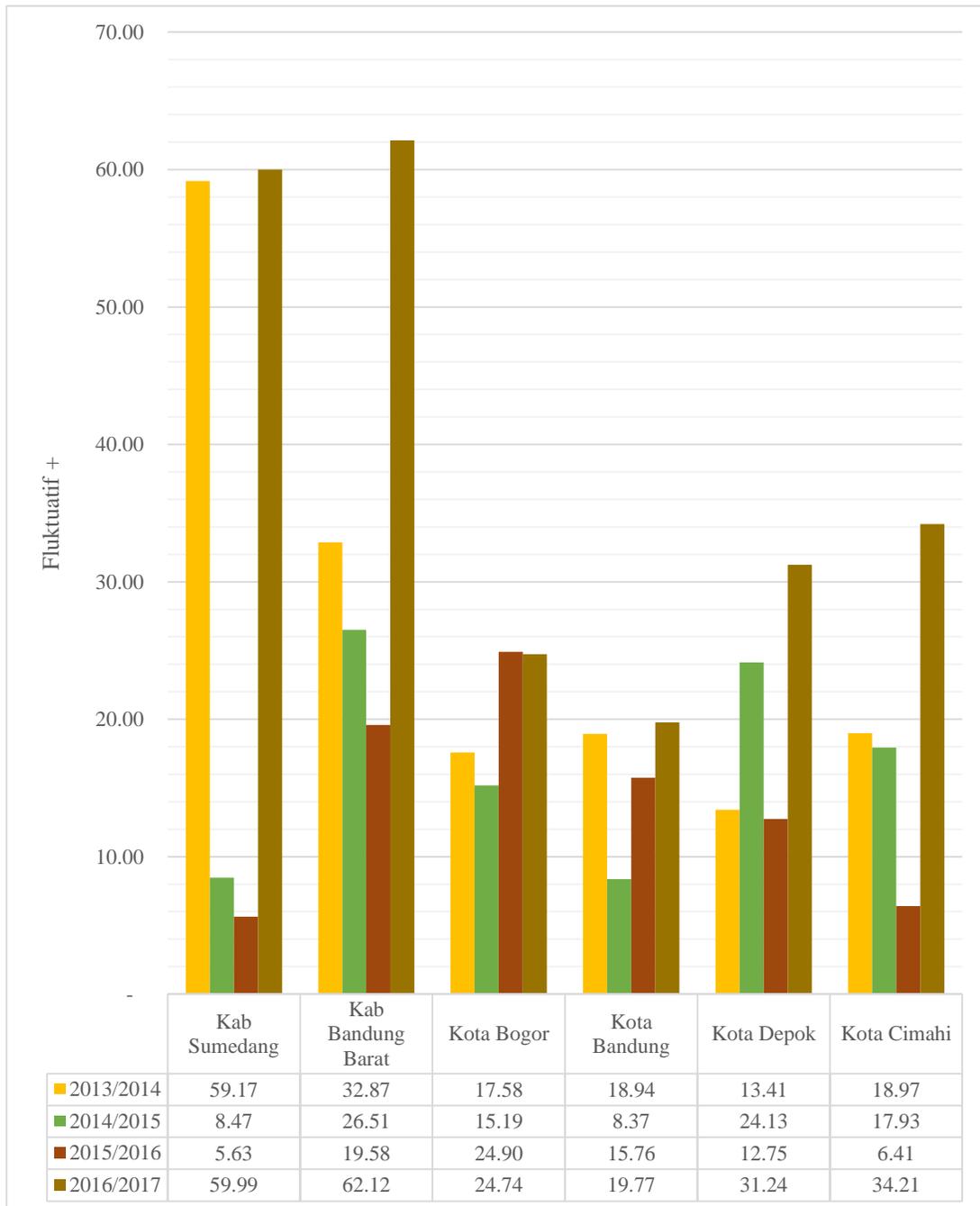
Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah)

Dengan rumus sebagai berikut:

Pertumbuhan PAD :	$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_{n-1}}$
--------------------------	---

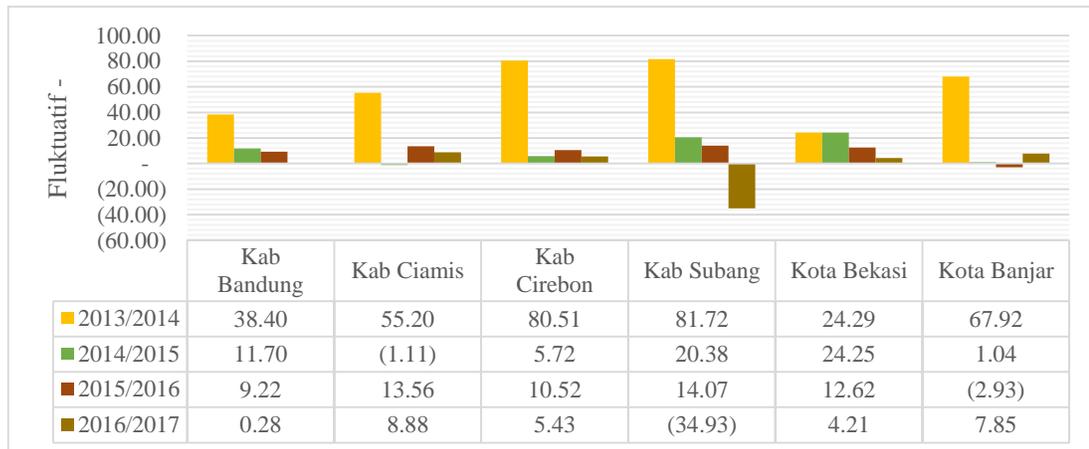
Sumber: Mutiha, (2016:110)

Berdasarkan tabel 4.7 dapat dilihat ada beberapa Daerah administratif yang berfluktuatif positif dari tahun ke tahun dalam mempertahankan serta meningkatkan keberhasilan pendapatan asli Daerahnya (PAD) yaitu sebagai berikut :



Gambar 4.10 Fluktuatif Positif Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah)

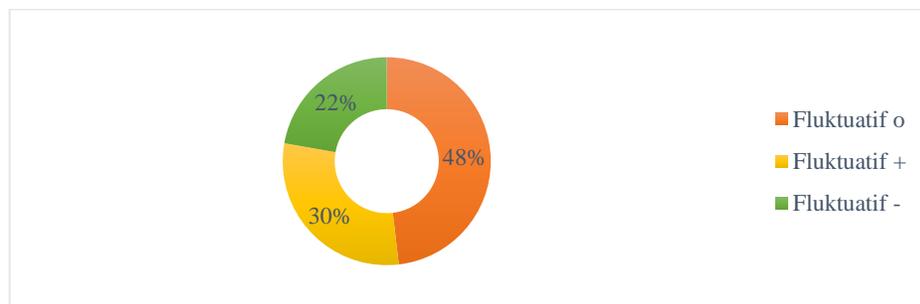
Adapun sebaliknya ada beberapa Daerah administratif yang kurang dalam mempertahankan serta meningkatkan keberhasilan pendapatan asli Daerahnya (PAD) yaitu sebagai berikut :



Gambar 4.11 Fluktuatif Negatif Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah)

Dari 27 Daerah administratif Provinsi Jawa Barat pada gambaran 4.10 dan 4.11 terlihat Daerah administratif mana yang mampu dan kurang dalam mempertahankan serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) adapun beberapa Daerah administratif lain yang relatif berfluktuatif cukup baik dan tidak terlalu turun dalam mempertahankan serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) dari periode 2013-2017, jika dapat di presentasikan maka sebagai berikut :



Gambar 4.12 Diagram Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat 2013-2017

Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah)

Tabel 4.8
Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Barat 2013-2017 (Dalam Persen)

Keterangan	Tahun				Rata-rata
	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	
Kabupaten Bogor	17.62	10.35	0.78	16.62	11
Kabupaten Sukabumi	22.19	9.16	5.99	10.15	12
Kabupaten Cianjur	16.93	18.48	4.10	16.12	14
Kabupaten Bandung	19.91	10.85	2.92	0.95	9
Kabupaten Garut	14.92	8.82	9.80	16.35	12
Kabupaten Tasikmalaya	15.94	3.20	21.32	3.43	11
Kabupaten Ciamis	(8.69)	14.30	3.50	4.16	3
Kabupaten Kuningan	16.71	25.07	5.36	3.16	13
Kabupaten Cirebon	18.03	15.66	6.35	6.81	12
Kabupaten Majalengka	14.80	21.22	3.31	4.24	11
Kabupaten Sumedang	21.69	12.93	1.54	11.10	12
Kabupaten Indramayu	21.54	11.70	8.71	4.78	12
Kabupaten Subang	22.19	7.75	6.95	(26.79)	3
Kabupaten Purwakarta	16.13	10.49	7.06	14.23	12
Kabupaten Karawang	18.81	13.46	(1.57)	16.05	12
Kabupaten Bekasi	16.68	15.25	1.15	9.12	11
Kabupaten Bandung Barat	14.39	13.81	3.05	21.43	13
Kabupaten Pangandaran	-	57.84	(9.25)	48.55	32
Kota Bogor	11.64	8.85	12.50	6.35	10
Kota Sukabumi	18.16	7.00	9.02	4.57	10
Kota Bandung	14.35	2.91	11.52	0.88	7
Kota Cirebon	22.19	13.76	(2.15)	1.20	9
Kota Bekasi	17.48	13.48	8.63	5.09	11
Kota Depok	14.91	11.52	0.99	14.52	10
Kota Cimahi	14.54	6.24	2.71	17.37	10
Kota Tasikmalaya	16.85	(7.27)	8.62	13.48	8
Kota Banjar	8.34	9.28	10.86	(0.38)	7

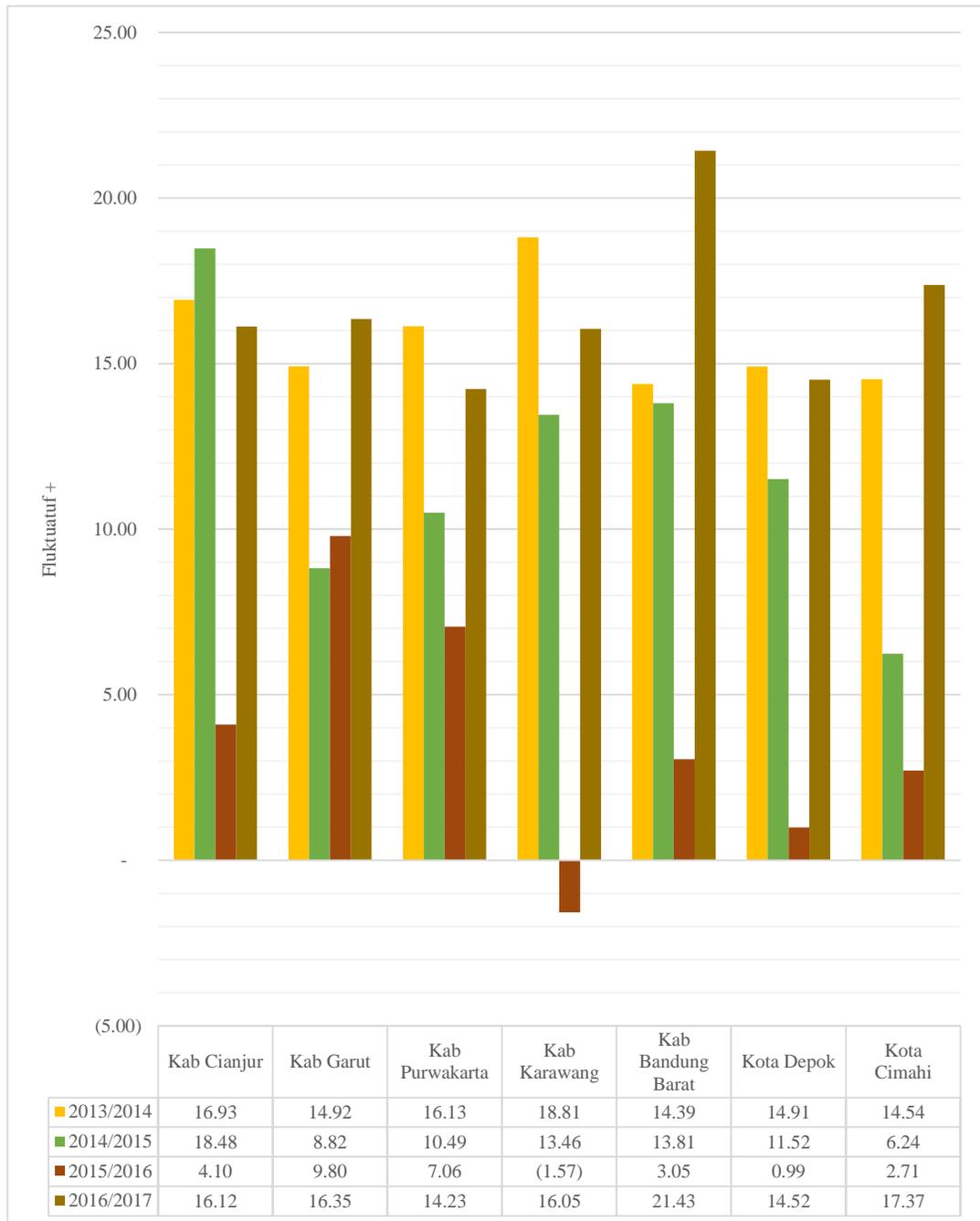
Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah)

Dengan rumus sebagai berikut:

<p>Pertumbuhan Pendapatan : $\frac{\text{Realisasi Penerimaan } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan } X_{n-1}}$</p>

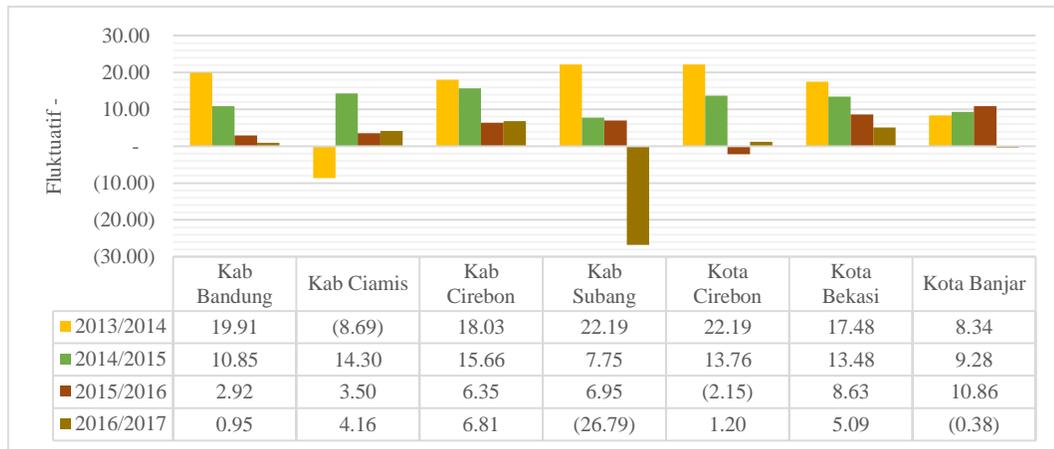
Sumber: Mutiha, (2016:110)

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat ada beberapa Daerah administratif yang berfluktuatif positif dari tahun ke tahun dalam mempertahankan serta meningkatkan keberhasilan pendapatan Daerahnya yaitu sebagai berikut :



Gambar 4.13 Fluktuatif Positif Pertumbuhan Pendapatan Daerah
 Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah)

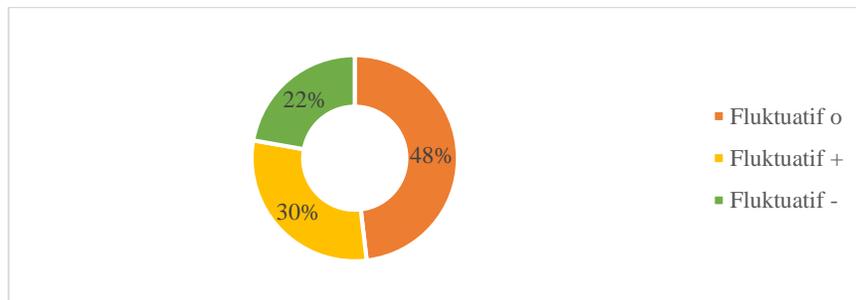
Adapun sebaliknya ada beberapa Daerah administratif yang kurang dalam mempertahankan serta meningkatkan keberhasilan pendapatan Daerah yaitu sebagai berikut :



Gambar 4.14 Fluktuatif Negatif Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah)

Dari 27 Daerah administratif Provinsi Jawa Barat pada gambaran 4.13 dan 4.14 terlihat Daerah administratif mana yang mampu dan kurang dalam mempertahankan serta meningkatkan Pendapatan Daerahnya adapun beberapa Daerah administratif lain yang relatif berfluktuatif cukup baik dan tidak terlalu turun dalam mempertahankan serta meningkatkan Pendapatan Daerahnya dari periode 2013-2017, jika dapat di presentasikan maka sebagai berikut :



Gambar 4.15 Diagram Pertumbuhan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat 2013-2017

Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah)

Tabel 4.9
Rasio Pertumbuhan Belanja
Provinsi Jawa Barat 2013-2017 (Dalam Persen)

Keterangan	Belanja Tidak Langsung				Rata-rata	Belanja Langsung				Rata-rata
	Tahun					Tahun				
	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017		2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	
Kabupaten Bogor	7.97	10.57	24.67	19.12	16	4.74	(18.10)	55.06	(5.30)	9
Kabupaten Sukabumi	10.73	21.02	7.00	0.21	10	16.86	9.54	4.22	18.67	12
Kabupaten Cianjur	10.58	16.70	5.65	36.34	17	39.51	19.79	18.74	11.22	22
Kabupaten Bandung	13.32	77.47	(31.13)	(11.29)	12	24.76	25.28	(4.04)	(0.47)	11
Kabupaten Garut	5.17	72.07	(27.45)	47.07	24	1.95	(56.12)	162.54	17.47	31
Kabupaten Tasikmalaya	11.14	20.26	8.71	34.95	19	12.58	0.05	52.02	(7.92)	14
Kabupaten Ciamis	(10.59)	4.88	8.60	34.74	9	(2.53)	37.76	2.17	(20.50)	4
Kabupaten Kuningan	8.89	20.80	16.21	25.56	18	15.73	49.45	4.59	(4.17)	16
Kabupaten Cirebon	5.67	20.07	10.56	28.60	16	18.01	11.09	20.50	10.43	15
Kabupaten Majalengka	7.59	15.11	55.34	4.17	21	29.59	23.54	(42.58)	50.81	15
Kabupaten Sumedang	11.64	8.85	23.23	16.95	15	38.88	22.80	(13.39)	20.47	17
Kabupaten Indramayu	7.85	20.77	6.71	7.63	11	36.51	4.25	18.50	(2.70)	14
Kabupaten Subang	7.25	8.18	17.42	36.38	17	54.12	3.19	8.97	(25.07)	10
Kabupaten Purwakarta	1.61	14.74	3.65	39.56	15	30.14	20.25	(6.12)	8.96	13
Kabupaten Karawang	18.74	9.80	10.30	22.76	15	9.76	19.60	(4.08)	23.24	12
Kabupaten Bekasi	23.11	10.96	30.02	19.06	21	9.23	13.01	5.93	(2.20)	6
Kabupaten Bandung Barat	9.63	7.62	15.15	38.26	18	13.64	13.65	8.77	6.02	11
Kabupaten Pangandaran	-	41.56	0.70	95.75	46	-	283.38	(11.57)	84.15	119
Kota Bogor	2.66	12.03	3.54	27.01	11	39.34	7.17	22.38	(9.34)	15
Kota Sukabumi	4.42	5.89	3.92	2.69	4	15.14	24.82	13.79	(1.40)	13
Kota Bandung	10.59	1.86	7.24	5.21	6	9.63	34.49	1,540.00	(93.83)	373
Kota Cirebon	13.04	4.81	0.86	(1.52)	4	33.10	22.13	14.06	(5.23)	16
Kota Bekasi	9.67	6.53	23.26	39.84	20	1.69	38.95	33.47	(29.59)	11
Kota Depok	8.74	15.20	8.33	31.23	16	5.67	4.22	38.40	(20.64)	7
Kota Cimahi	6.61	0.32	15.49	(51.16)	(7)	20.38	5.92	36.85	11.73	19
Kota Tasikmalaya	11.28	5.01	5.55	0.28	6	10.80	(13.24)	54.56	9.84	15
Kota Banjar	6.14	9.49	18.57	(3.21)	8	(6.49)	16.42	23.39	(15.93)	4

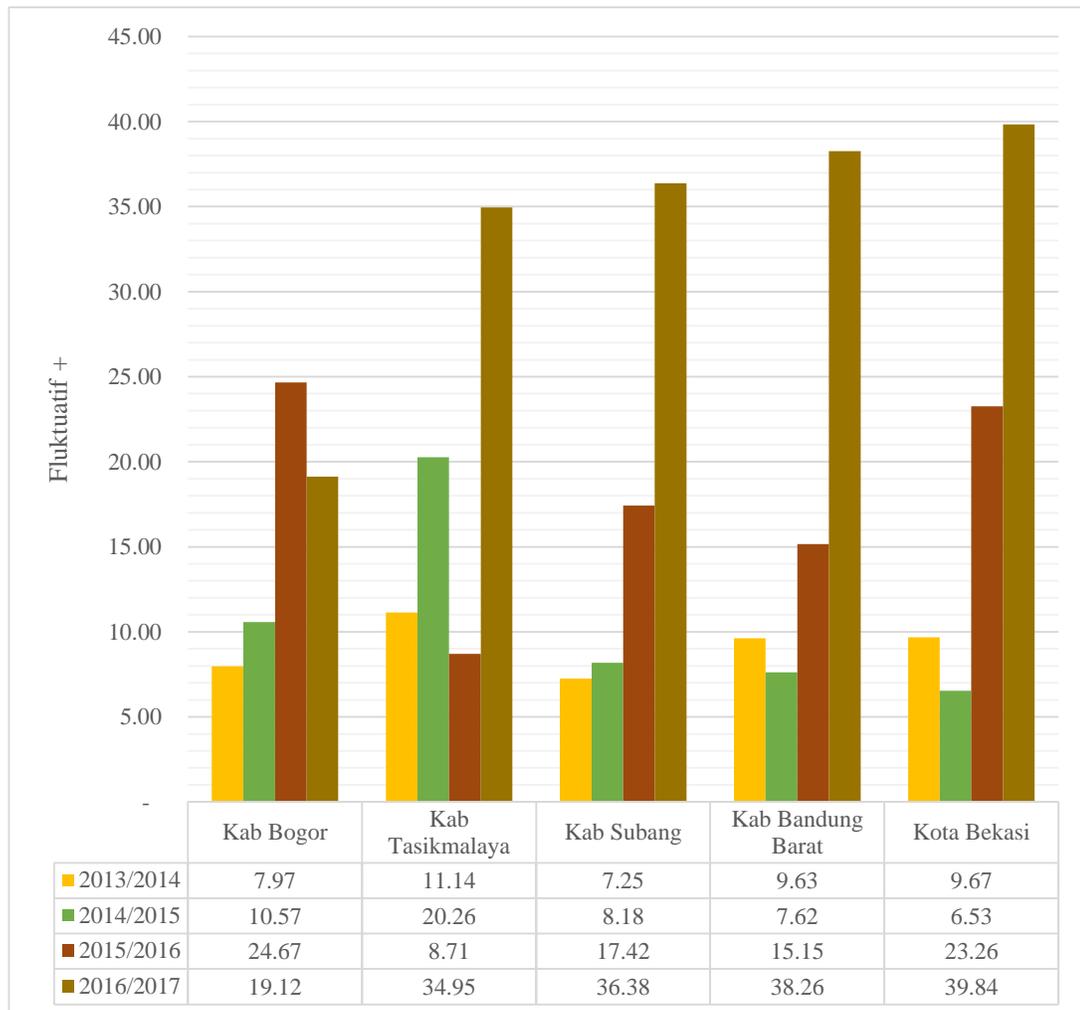
Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah)

Dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Belanja : } \frac{\text{Realisasi Belanja } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja } X_{n-1}}$$

Sumber: Mutiha, (2016:110)

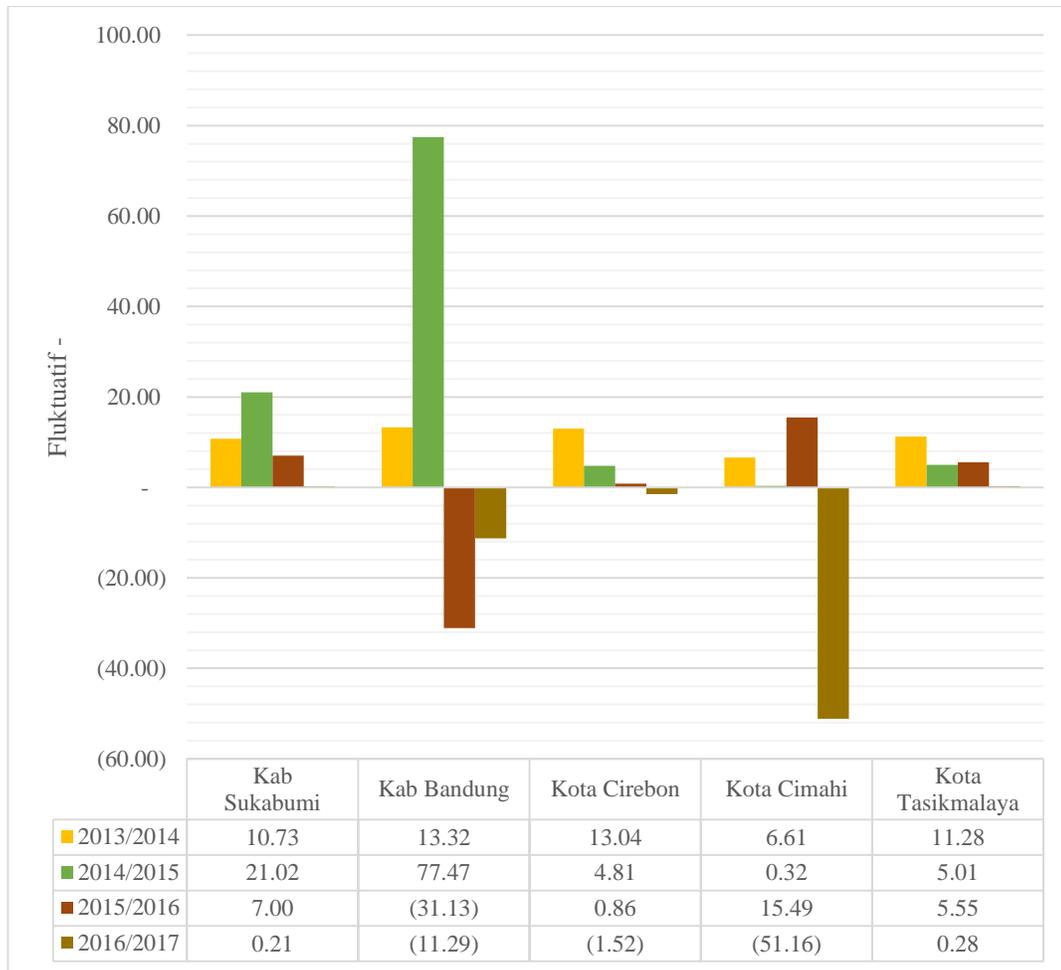
Berdasarkan tabel 4.9 di atas dapat dilihat dari 18 Kabupaten dan 9 kota Provinsi Jawa Barat mengalami fluktuatif antara belanja tidak langsung dan belanja langsung, dan berikut ini adalah gambaran pertumbuhan dan penyusutan dari periode 2013-2017 antara belanja tidak langsung dan belanja langsung :



Gambar 4.16 Fluktuatif Positif Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung

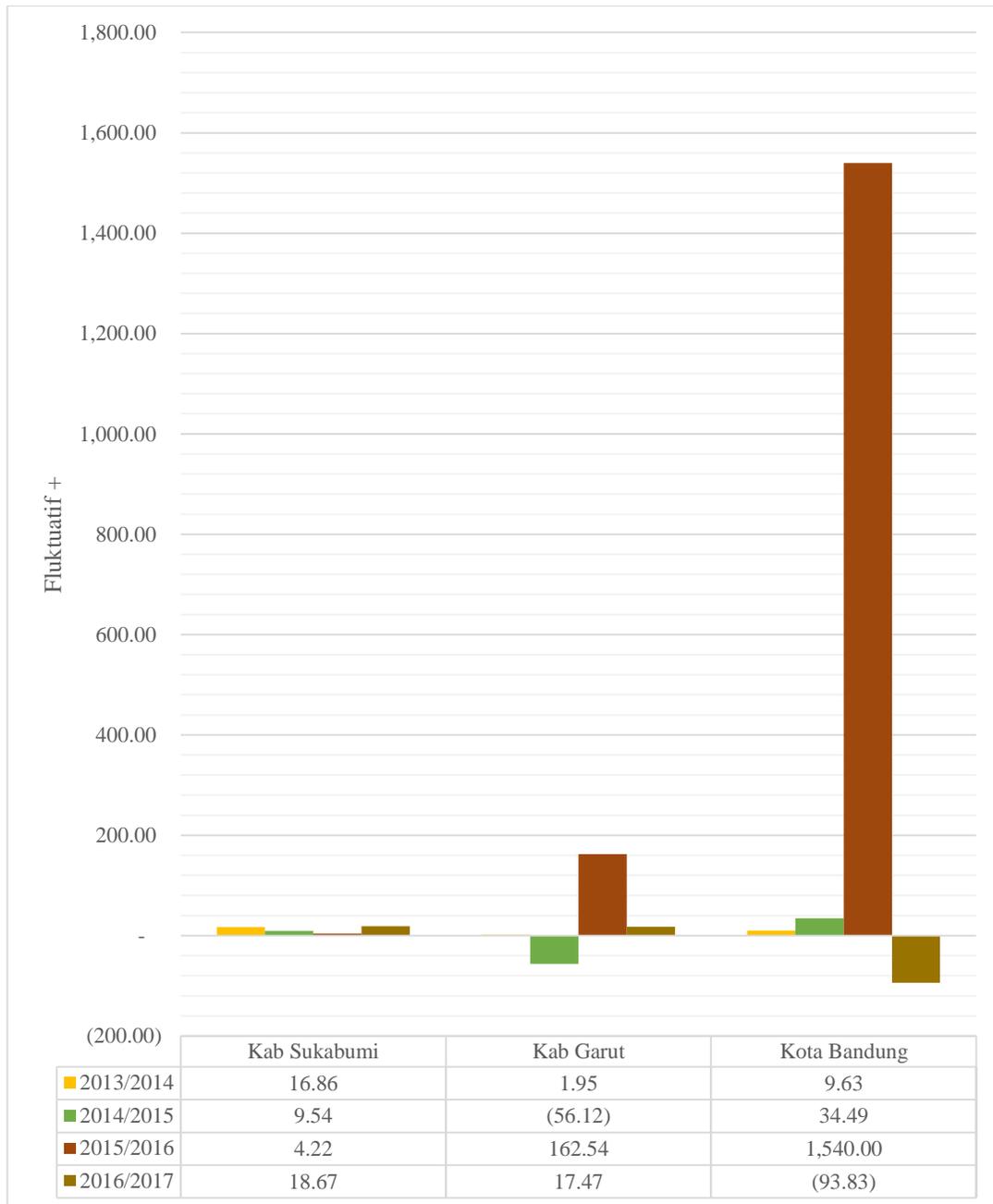
Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah)

Dapat dilihat dari gambar 4.13 dari 27 Daerah administratif Provinsi Jawa Barat dari periode 2013-2017 hanya lima Daerah administratif yang mengalami pertumbuhan yang positif pada belanja tidak langsung, adapun sebaliknya berikut ini adalah gambaran Daerah administratif yang mengalami penyusutan per tahun :



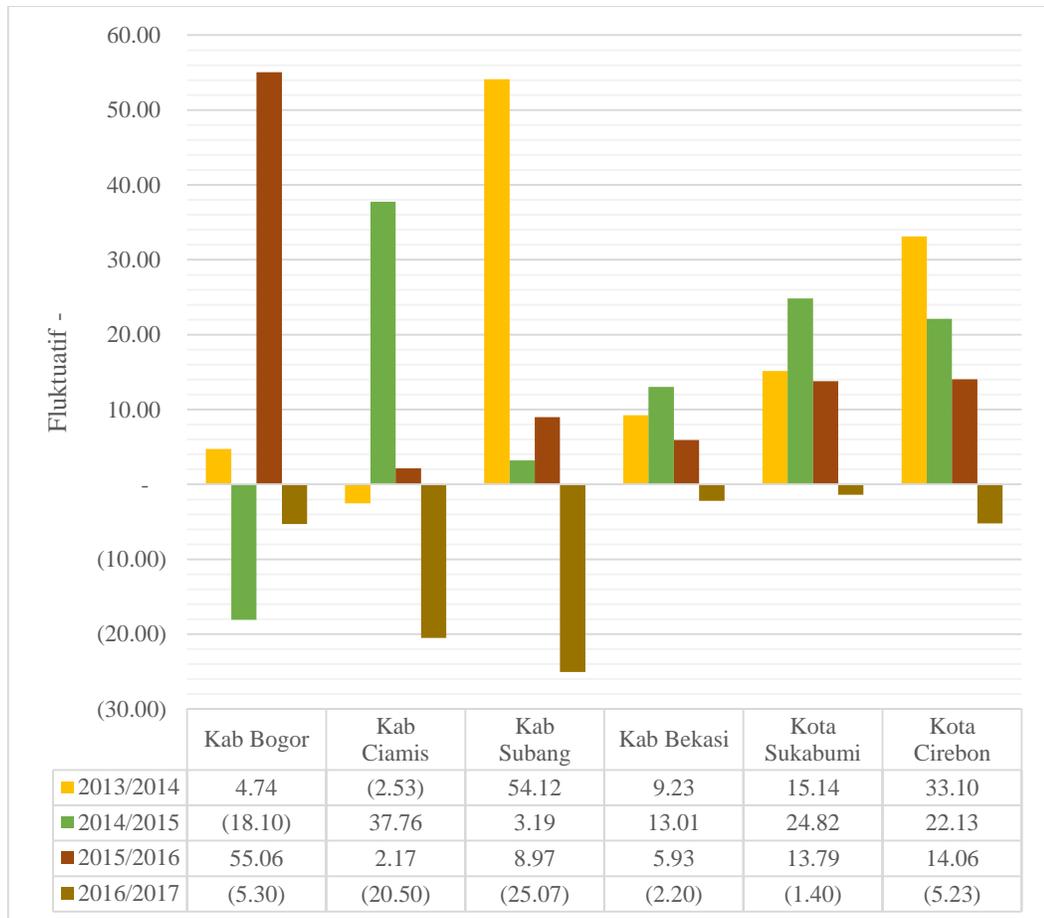
Gambar 4.17 Fluktuatif Negatif Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung
 Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah)

Dari gambaran di atas dapat diketahui bahwa dari 18 Kabupaten dan 9 kota hanya lima Daerah administratif yang mengalami pertumbuhan belanja tidak langsung yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Bekasi, dengan perolehan rata-rata pertumbuhan dari 2013-2017 dalam skala 15%-20%, adapun untuk Daerah administratif yang mengalami penyusutan yaitu Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung, Kota Cirebon, Kota Cimahi, dan Kota Tasikmalaya, dengan perolehan rata-rata pertumbuhan dari 2013-2017 <12% dengan fluktuatif yang kurang baik dan itu adalah rata-rata pertumbuhan yang relatif kecil di dibandingkan dengan pertumbuhan Daerah administratif lainnya yang relatif berfluktuatif tidak terlalu *down* dari tahun ke tahun.



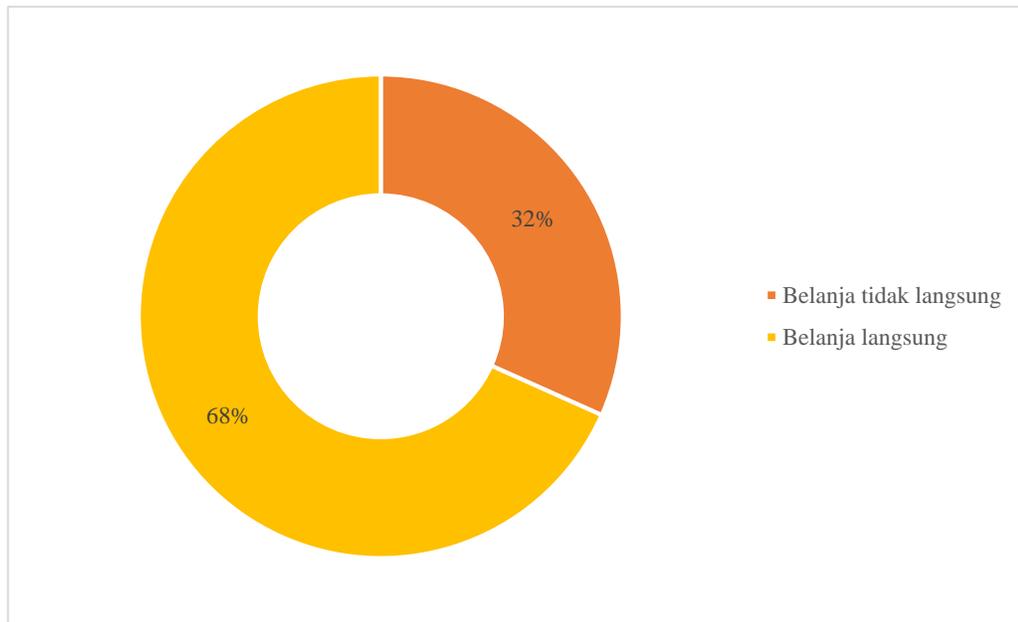
Gambar 4.18 Fluktuatif Positif Pertumbuhan Belanja Langsung
 Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah)

Berdasarkan gambar 4.15 dari 27 Daerah administratif Provinsi Jawa Barat dari periode 2013-2017 hanya tiga Daerah administratif yang mengalami pertumbuhan yang positif pada belanja langsung, adapun sebaliknya berikut ini adalah gambaran Daerah administratif yang mengalami penyusutan per tahun:



Gambar 4.19 Fluktuatif Negatif Pertumbuhan Belanja Langsung
 Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah)

Dari gambaran di atas dapat diketahui bahwa dari 18 Kabupaten dan 9 kota hanya 3 Daerah administratif yang mengalami pertumbuhan belanja langsung dari 2013-2017 yaitu Kabupaten Sukabumi dengan perolehan rata-rata 31%, Kabupaten Garut dengan perolehan rata-rata 12%, dan Kota Bandung dengan perolehan rata-rata paling besar yaitu 373%, adapun untuk Daerah administratif yang mengalami penyusutan yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Subang, Kabupaten Bekasi, Kota Sukabumi dan Kota Cirebon, dengan perolehan rata-rata dari 2013-2017 <17% dengan fluktuatif yang kurang baik dari tahun ke tahun. Jika dipresentasikan dalam rata-rata dari 27 Daerah administratif pertumbuhan belanja tidak langsung memperoleh presentase relatif kecil sebesar 13.64% tidak sebesar perolehan belanja langsung yaitu sebesar 29.39% dan dapat di gambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.20 Diagram Pertumbuhan Belanja Provinsi Jawa Barat 2013-2017
 Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah)

Dari perhitungan rasio pertumbuhan diatas dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 18 Kabupaten dan 9 Kota Provinsi Jawa Barat 2013-2017 menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun cenderung pertumbuhannya semakin berkurang, akan tetapi terlihat dari 18 Kabupaten dan 9 Kota Provinsi Jawa Barat mampu mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya, terlihat dari presentase 100% hanya sebesar 22% yang mengalami penyusutan dibandingkan kenaikan dan fluktuatif yang jika di jumlahkan memperoleh sebesar 78% pada sumber pendapatan, dan pengeluaran yang lebih pada pertumbuhan belanja pembangunan di bandingkan belanja rutin.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis dan evaluasi data dalam penelitian ini, maka dapat diambil beberapa simpulan dan saran serta keterbatasan penelitian sebagai berikut:

5.1 Simpulan

Sesuai dengan hasil analisis dan interpretasi data yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil simpulan, sebagai berikut:

1. Tingkat rasio kemandirian dalam Pola hubungan kemandirian Daerah administratif Provinsi Jawa Barat dalam lima tahun terakhir menunjukkan pola hubungan instruktif dimana peran pemerintah pusat masih lebih dominan besar dari pada Pemerintah Daerah administratif Provinsi Jawa Barat dengan pencapaian rata-rata kemandirian 0-25% dalam kemampuan keuangan yang rendah sekali.
2. Tingkat rasio efektivitas keuangan Daerah administratif Provinsi Jawa Barat dari presentase 100% hanya 69% Daerah administratif yang bisa di kriteriakan cukup efektif dan 31% lainnya kurang efektif.
3. Tingkat Rasio efisiensi dari presentase 100% hanya 3% Daerah administratif yang bisa di kriteriakan efisien, 22% cukup efisien, 63% kurang efisien, dan 12% lainnya tidak efisien.
4. Tingkat rasio aktivitas Daerah administratif Provinsi Jawa Barat dalam porsi belanja yaitu belanja tidak langsung relatif lebih besar dibandingkan belanja langsung dengan presentase 53% banding 47%, dari 27 Daerah administratif Provinsi Jawa Barat dalam kurung waktu lima tahun dalam presentase 53% banding 47%, 6% Daerah administratif lebih pada belanja rutin di bandingkan belanja pembangunan.
5. Tingkat rasio pertumbuhan, dalam pertumbuhan Daerah administratif Provinsi Jawa Barat dalam pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan total pendapatan Daerah menunjukkan dari presentase total 27 Daerah administratif Provinsi Jawa Barat dalam kurung waktu lima tahun 30% dalam kategori *growt positive*, 22% dalam kategori *growt negative*, dan 48% berfluktuatif dari tahun ke tahun. Adapun pertumbuhan dalam hal belanja Daerah dari 27 Daerah administratif Provinsi Jawa Barat belanja langsung lebih dominan dibandingkan dengan belanja tidak langsung dengan perolehan

presentase 68% banding 32% dengan rata-rata kenaikan pertahun dalam kurung waktu lima tahun yaitu 29.39% pertumbuhan belanja langsung dan 13.64% pertumbuhan belanja tidak langsung, jika dilihat dalam rasio aktivitas, pada aktivitas Daerah administratif Provinsi Jawa Barat dalam porsi belanja yaitu belanja tidak langsung relatif lebih besar dibandingkan belanja langsung dengan presentase 53% banding 47%, 6% lebih pada belanja rutin di bandingkan belanja pembangunan. Akan tetapi dalam segi pertumbuhan mayoritas dari 27 Daerah administratif Provinsi Jawa Barat belanja pembangunan ataupun belanja langsung lebih di prioritaskan di bandingkan dengan belanja rutin ataupun belanja tidak langsung, terlihat dari segi pertumbuhan yang relatif kecil dengan presentase kenaikan hanya sebesar 13.64% di bandingkan dengan belanja langsung yang memperoleh kenaikan sebesar 29.39%.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah khususnya Provinsi Jawa Barat diharapkan untuk meningkatkan kinerja keuangan dengan meningkatkan usaha pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara lebih intensif dan efektif serta efisien dalam hal penerimaan maupun pengeluaran, dengan mengoptimalkan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada guna meningkatkan pertumbuhan dan kemandirian Daerah.
2. Analisis laporan keuangan daerah dengan rasio keuangan Daerah diharapkan dapat menjadi rekomendasi atas pelaksanaan laporan keuangan sebagai bahan koreksi dan masukan untuk peningkatan peran Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan akuntabilitas publik.
3. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah periode penelitian, subjek penelitian, dan melengkapai rasio keuangan Daerah yang digunakan untuk penelitian serta data yang digunakan tidak hanya sebatas data sekunder, akan tetapi dapat juga menggunakan data primer.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis sangat menyadari bahwa temuan-temuan yang dihasilkan belum secara sempurna menjawab semua permasalahan yang di bahas, terdapat banyak keterbatasan yang melingkupi penelitian ini, yaitu:

1. Keterbatasan laporan keuangan yang sebagian besar website resmi Daerah administratif Provinsi Jawa Barat kurang dalam menyajikan atau mempublikasikan laporan keuangan tahunan.
2. Data penelitian hanya didapat dari angka yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat.
3. Dari 27 Daerah administratif Provinsi Jawa Barat terdapat satu Daerah yang kurang dalam Laporan keuangan yaitu Kabupaten Pangandaran dalam laporan tahun 2013, hal ini dikarenakan Kabupaten Pangandaran merupakan Daerah otonom baru Provinsi Jawa Barat yang baru ditetapkan dan di dirikan pada tahun 2012, sehingga hanya dihitung ataupun di analisis sesuai periode laporan keuangan yang ada yakni 4 periode dengan laporan keuangan 2014-2017.
4. Periode waktu yang relatif pendek yaitu lima tahun, hal ini menjadikan analisis permasalahan kurang maksimal, karena pembahasan suatu proses memerlukan periode waktu yang relatif lebih dari cukup.
5. Rasio keuangan Daerah yang digunakan dalam peneilitian tidak mencakup seluruhnya sehingga kurang terkesan lengkap dalam analisis keuangan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. Dalam Angka 2013-2017. Diambil dari <Http://www.jabar.bps.go.id>
- Badan Pemeriksa Laporan Keuangan. Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2013-2017. Diambil Dari <Http://www.bandung.bpk.go.id>
- Departemen Dalam Negeri. 1996. Keputusan Dalam Negeri No. 690 900 327 Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan. Sekretariat Negara, Jakarta.
- _____. 2004. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Dewi, D Laksamita. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016. UNDIP. Skripsi.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Laporan Realisasi Anggaran Jawa Barat 2013-2017. Diambil dari <Http://www.djpk.depkeu.go.id>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Laporan Neraca Jawa Barat 2013-2017. Diambil dari <Http://www.djpk.depkeu.go.id>
- Dwijayanti, R dan Ruserlistyanti. (2013). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Se-Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. ISSN : 1693-0908 Volume.12 No.01. Maret 2013 Fakultas Ekonomi UPN “Veteran” Yogyakarta.
- Halim A, & M Syam Kusufi. (2014). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Istiyaningtias, Dian. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Dan Pemerintah Kota Di Jawa Tengah Tahun 2010-2014. IAIN. Skripsi.
- Kurniati, Siti. (2012). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Se-Jawa Tengah Sebelum Dan Sesudah Krisis Ekonomi 2008. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang. Skripsi.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Edisi Terbaru. Yogyakarta: ANDI.
- Muhidin, A, S. Bagaimanakah menyusun kerangka berpikir penelitian. Diambil dari Wordpress: <Http://sambas.staf.upi.edu>.

Mutiha, H, Arthaingan. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010-2014. Jurnal Vokasi Indonesia pp: 105-121 Volume.04 No.02. Juni 2016 Universitas Indonesia.

Pemerintah Daerah Jawa Barat. Data Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat. Diambil Dari <Http://www.jabarprov.go.id>

Pemerintah Indonesia. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Revisi Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Ratmono, D & M Sholihin. (2017). Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua. Edisi 2. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Cetakan 21. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni,, V, Wiratna. (2015). Akuntansi Sektor Publik, Teori, Konsep, Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sujarweni,, V, Wiratna. (2014). Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, Dan Mudah Dipahami. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Tamboto Leady, Jenny Morasa, Lidia Mawikere (2014). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Masa Otonomi Daerah Pada Kabupaten Minahasa Tenggara. ISSN 2303-1174 Jurnal EMBA. Vol 2. No 2. Juni 2014 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado.

Tanjung, H, Abdul. (2015). Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua Untuk SKPD. Bandung: Alfabeta.

Lampiran 1. Rasio Kemandirian Provinsi Jawa Barat 2013-2017*(Dalam Persen)

Keterangan	Tahun					Rata-rata	Klasifikasi
	2013	2014	2015	2016	2017		
Kabupaten Bogor	23.69	28.31	27.06	31.37	39.65	30	Rendah
Kabupaten Sukabumi	10.65	14.92	14.59	14.92	19.86	15	Rendah Sekali
Kabupaten Cianjur	11.08	14.47	13.72	13.04	13.85	13	Rendah Sekali
Kabupaten Bandung	13.80	15.72	15.23	16.68	18.08	16	Rendah Sekali
Kabupaten Garut	7.83	11.48	11.78	10.51	15.27	11	Rendah Sekali
Kabupaten Tasikmalaya	3.04	5.66	6.30	6.12	11.56	7	Rendah Sekali
Kabupaten Ciamis	5.00	8.41	7.37	8.23	8.76	8	Rendah Sekali
Kabupaten Kuningan	6.62	10.32	9.06	9.84	13.10	10	Rendah Sekali
Kabupaten Cirebon	10.49	16.19	14.17	14.10	14.21	14	Rendah Sekali
Kabupaten Majalengka	7.59	10.12	10.67	11.77	18.20	12	Rendah Sekali
Kabupaten Sumedang	10.42	13.65	13.02	13.56	20.63	14	Rendah Sekali
Kabupaten Indramayu	7.54	12.01	11.40	10.69	17.34	12	Rendah Sekali
Kabupaten Subang	7.36	10.97	12.07	12.55	12.47	11	Rendah Sekali
Kabupaten Purwakarta	12.28	17.68	18.19	17.99	21.79	18	Rendah Sekali
Kabupaten Karawang	20.70	25.09	25.80	24.84	31.35	26	Rendah Sekali
Kabupaten Bekasi	28.69	33.40	34.40	33.92	40.22	34	Rendah
Kabupaten Bandung Barat	10.15	12.01	14.46	14.99	21.10	15	Rendah Sekali
Kabupaten Pangandaran	-	5.01	15.63	6.31	7.24	9	Rendah Sekali
Kota Bogor	26.14	26.45	28.34	31.44	37.68	30	Rendah
Kota Sukabumi	20.74	24.86	23.34	23.01	27.68	24	Rendah Sekali
Kota Bandung	30.28	30.30	29.47	32.23	41.14	33	Rendah
Kota Cirebon	18.77	22.02	22.72	23.20	29.51	23	Rendah Sekali
Kota Bekasi	28.59	30.98	37.88	33.22	38.98	34	Rendah
Kota Depok	23.38	23.62	25.22	26.08	34.68	27	Rendah
Kota Cimahi	17.68	17.92	19.00	18.27	26.83	20	Rendah Sekali
Kota Tasikmalaya	12.21	14.92	6.92	13.36	18.01	13	Rendah Sekali
Kota Banjar	9.69	15.70	14.09	12.36	14.34	13	Rendah Sekali

Lampiran 2. Rasio Efektivitas Provinsi Jawa Barat 2013-2017*(Dalam Persen)

Keterangan	Tahun					Rata-rata	Klasifikasi
	2013	2014	2015	2016	2017		
Kabupaten Bogor	85.88	88.88	84.34	81.59	90.92	86	Kurang Efektif
Kabupaten Sukabumi	93.84	96.05	91.96	92.51	93.14	93	Cukup Efektif
Kabupaten Cianjur	93.63	92.44	93.99	92.89	97.41	94	Cukup Efektif
Kabupaten Bandung	91.61	90.45	86.95	89.75	97.90	91	Cukup Efektif
Kabupaten Garut	89.17	96.87	96.35	98.76	97.06	96	Cukup Efektif
Kabupaten Tasikmalaya	95.49	94.19	89.50	90.97	94.58	93	Cukup Efektif
Kabupaten Ciamis	93.44	92.53	93.77	95.36	97.14	94	Cukup Efektif
Kabupaten Kuningan	95.60	96.49	93.86	93.85	97.36	95	Cukup Efektif
Kabupaten Cirebon	96.87	97.72	93.57	89.63	91.53	94	Cukup Efektif
Kabupaten Majalengka	95.41	93.28	93.79	91.49	95.13	94	Cukup Efektif
Kabupaten Sumedang	94.29	94.41	93.77	93.88	99.16	95	Cukup Efektif
Kabupaten Indramayu	91.52	94.37	94.65	95.29	98.49	95	Cukup Efektif
Kabupaten Subang	93.00	93.22	91.76	89.49	100.00	93	Cukup Efektif
Kabupaten Purwakarta	96.92	98.17	96.67	99.32	99.23	98	Cukup Efektif
Kabupaten Karawang	84.33	88.27	88.62	88.40	92.93	89	Kurang Efektif
Kabupaten Bekasi	83.57	84.69	84.38	80.91	86.86	84	Kurang Efektif
Kabupaten Bandung Barat	90.66	92.34	100.00	89.36	94.21	93	Cukup Efektif
Kabupaten Pangandaran	-	99.90	88.67	88.26	84.60	90	Kurang Efektif
Kota Bogor	88.83	85.33	86.40	86.34	88.22	87	Kurang Efektif
Kota Sukabumi	100.00	95.87	89.94	90.65	93.77	94	Cukup Efektif
Kota Bandung	90.92	87.46	80.78	85.12	91.51	87	Kurang Efektif
Kota Cirebon	92.02	91.03	99.70	87.75	92.41	93	Cukup Efektif
Kota Bekasi	87.35	89.46	99.89	84.51	100.00	92	Cukup Efektif
Kota Depok	77.29	79.12	75.88	70.28	81.56	77	Kurang Efektif
Kota Cimahi	90.03	87.84	83.90	77.85	100.00	88	Kurang Efektif
Kota Tasikmalaya	96.46	93.93	86.74	84.35	92.57	91	Cukup Efektif
Kota Banjar	85.15	89.03	86.42	86.58	92.77	88	Kurang Efektif

Lampiran 3. Rasio Efisiensi Provinsi Jawa Barat 2013-2017*(Dalam Persen)

Keterangan	Tahun					Rata-rata	Klasifikasi
	2013	2014	2015	2016	2017		
Kabupaten Bogor	86.67	80.97	66.14	88.19	89.63	82	Cukup Efisien
Kabupaten Sukabumi	95.15	90.53	91.75	92.07	91.27	92	Kurang Efisien
Kabupaten Cianjur	89.64	90.99	92.06	96.84	109.98	96	Kurang Efisien
Kabupaten Bandung	88.19	85.61	115.29	90.39	91.09	94	Kurang Efisien
Kabupaten Garut	95.43	93.60	99.69	96.37	109.74	99	Kurang Efisien
Kabupaten Tasikmalaya	93.40	88.70	92.46	94.56	112.62	96	Kurang Efisien
Kabupaten Ciamis	92.94	92.60	94.86	98.89	110.43	98	Kurang Efisien
Kabupaten Kuningan	95.54	91.79	93.07	98.72	114.05	99	Kurang Efisien
Kabupaten Cirebon	97.22	91.77	88.40	91.15	105.50	95	Kurang Efisien
Kabupaten Majalengka	92.01	91.16	89.86	93.53	107.63	95	Kurang Efisien
Kabupaten Sumedang	92.64	92.75	93.57	98.49	110.71	98	Kurang Efisien
Kabupaten Indramayu	91.47	93.29	94.39	97.96	99.22	95	Kurang Efisien
Kabupaten Subang	90.56	90.63	87.92	91.53	158.88	104	Tidak Efisien
Kabupaten Purwakarta	97.47	95.01	99.08	94.61	105.31	98	Kurang Efisien
Kabupaten Karawang	86.53	86.98	88.27	91.98	102.48	91	Kurang Efisien
Kabupaten Bekasi	81.41	81.17	78.68	86.64	91.97	84	Cukup Efisien
Kabupaten Bandung Barat	91.13	90.24	94.48	92.18	100.34	94	Kurang Efisien
Kabupaten Pangandaran	-	79.85	89.30	93.15	114.69	94	Kurang Efisien
Kota Bogor	80.24	82.67	84.13	84.85	86.58	84	Cukup Efisien
Kota Sukabumi	99.26	88.20	89.19	90.09	89.45	91	Kurang Efisien
Kota Bandung	84.53	78.31	82.43	730.26	88.43	213	Tidak Efisien
Kota Cirebon	88.86	88.01	96.21	93.49	93.74	92	Kurang Efisien
Kota Bekasi	87.27	79.88	98.19	99.19	105.83	94	Kurang Efisien
Kota Depok	75.76	72.08	67.14	77.88	76.54	74	Efisien
Kota Cimahi	85.13	81.98	76.00	86.77	79.40	82	Cukup Efisien
Kota Tasikmalaya	92.61	85.71	82.66	92.67	94.10	90	Cukup Efisien
Kota Banjar	88.63	84.71	85.16	93.28	90.00	88	Cukup Efisien

Lampiran 4. Rasio Aktivitas Belanja Tidak Langsung Provinsi Jawa Barat
2013-2017*(Dalam Persen)

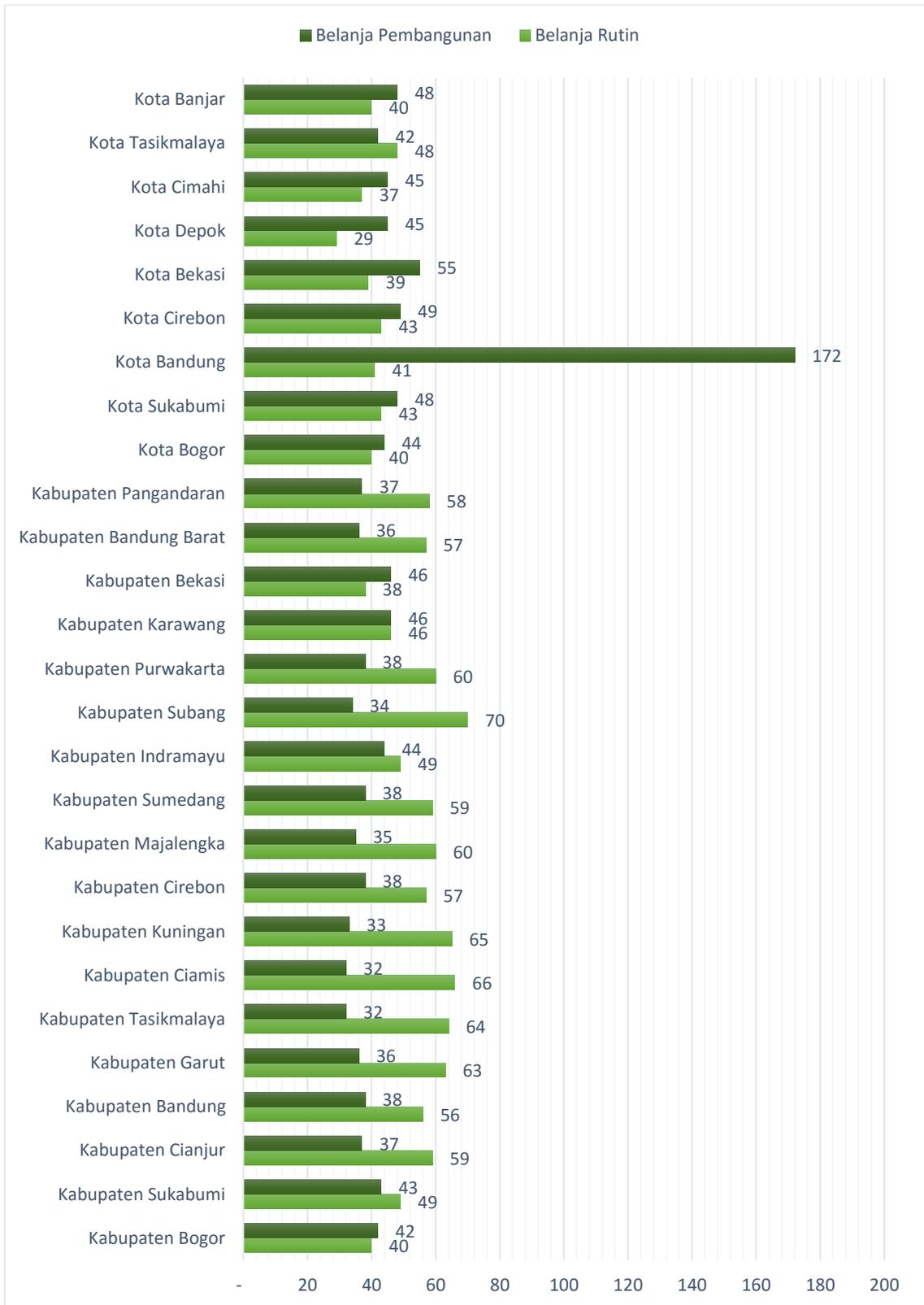
Keterangan	Tahun					Rata-rata
	2013	2014	2015	2016	2017	
Kabupaten Bogor	38.91	36.97	35.15	42.06	47.88	40
Kabupaten Sukabumi	50.97	47.28	50.19	50.97	46.69	49
Kabupaten Cianjur	59.78	55.82	55.90	56.08	69.04	59
Kabupaten Bandung	52.74	49.20	75.72	52.31	50.14	56
Kabupaten Garut	53.35	53.04	83.42	56.50	70.19	63
Kabupaten Tasikmalaya	61.06	57.76	63.95	58.25	79.01	64
Kabupaten Ciamis	64.54	62.58	58.19	62.08	81.81	66
Kabupaten Kuningan	64.89	61.11	57.41	63.32	79.94	65
Kabupaten Cirebon	59.70	53.92	53.60	53.38	65.62	57
Kabupaten Majalengka	55.41	50.77	48.47	71.09	73.88	60
Kabupaten Sumedang	58.52	53.76	51.47	62.53	69.53	59
Kabupaten Indramayu	52.01	47.59	51.61	54.15	39.46	49
Kabupaten Subang	62.06	54.60	53.96	57.78	120.28	70
Kabupaten Purwakarta	62.81	55.86	56.92	56.62	69.11	60
Kabupaten Karawang	41.70	43.62	42.38	47.38	52.59	46
Kabupaten Bekasi	32.57	34.83	33.41	41.18	48.23	38
Kabupaten Bandung Barat	55.44	54.12	55.42	55.34	66.43	57
Kabupaten Pangandaran	-	60.93	48.51	53.58	67.68	58
Kota Bogor	42.86	37.86	39.45	36.29	44.28	40
Kota Sukabumi	52.10	44.14	40.98	39.37	39.99	43
Kota Bandung	44.41	41.31	37.77	38.27	42.91	41
Kota Cirebon	47.67	43.62	44.02	39.93	40.93	43
Kota Bekasi	36.15	34.57	36.24	34.79	54.77	39
Kota Depok	27.75	26.88	26.63	26.46	35.19	29
Kota Cimahi	45.40	41.24	37.19	38.81	20.74	37
Kota Tasikmalaya	51.05	47.34	49.51	46.79	45.37	48
Kota Banjar	38.75	39.70	38.61	41.37	43.07	40

Lampiran 4. Rasio Aktivitas Belanja Langsung Provinsi Jawa Barat 2013-2017*

(Dalam Persen)

Keterangan	Tahun					Rata-rata
	2013	2014	2015	2016	2017	
Kabupaten Bogor	47.75	44.01	31.00	46.13	41.75	42
Kabupaten Sukabumi	44.18	43.27	41.56	41.11	44.59	43
Kabupaten Cianjur	29.86	35.18	36.16	40.77	40.94	37
Kabupaten Bandung	35.46	36.42	39.57	38.08	40.95	38
Kabupaten Garut	42.08	40.56	16.27	39.87	39.57	36
Kabupaten Tasikmalaya	32.31	30.95	28.51	36.31	33.61	32
Kabupaten Ciamis	28.40	30.02	36.67	36.81	28.62	32
Kabupaten Kuningan	30.65	30.68	35.66	35.40	34.11	33
Kabupaten Cirebon	37.52	37.85	34.81	37.78	39.88	38
Kabupaten Majalengka	36.60	40.39	41.38	22.44	33.75	35
Kabupaten Sumedang	34.12	38.99	42.11	35.96	41.18	38
Kabupaten Indramayu	39.46	45.70	42.78	46.95	45.07	44
Kabupaten Subang	28.49	36.02	33.96	33.75	38.60	34
Kabupaten Purwakarta	34.66	39.34	42.16	37.99	36.20	38
Kabupaten Karawang	44.83	43.35	45.88	44.61	49.79	46
Kabupaten Bekasi	48.84	46.34	45.27	45.46	43.73	46
Kabupaten Bandung Barat	35.70	36.12	39.06	36.84	33.92	36
Kabupaten Pangandaran	-	18.92	40.79	39.57	47.02	37
Kota Bogor	37.38	44.81	44.68	48.56	42.30	44
Kota Sukabumi	47.16	44.06	48.21	50.71	49.46	48
Kota Bandung	40.12	37.00	44.66	691.99	45.31	172
Kota Cirebon	41.20	44.39	52.20	53.55	52.81	49
Kota Bekasi	51.11	45.31	61.96	64.40	51.06	55
Kota Depok	48.01	45.20	40.51	51.42	41.35	45
Kota Cimahi	39.73	40.75	38.80	47.97	58.65	45
Kota Tasikmalaya	41.56	38.37	33.15	45.88	48.73	42
Kota Banjar	49.88	45.01	46.55	51.91	46.94	48

Lampiran 4. Rasio Aktivitas Belanja Provinsi Jawa Barat 2013-2017*(Dalam Persen)



Lampiran 5. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat
2013-2017*(Dalam Persen)

Keterangan	Tahun				Rata-rata
	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	
Kabupaten Bogor	35.84	11.16	20.78	32.26	25
Kabupaten Sukabumi	67.14	11.47	7.74	45.65	33
Kabupaten Cianjur	54.66	10.47	0.12	17.59	21
Kabupaten Bandung	38.40	11.70	9.22	0.28	15
Kabupaten Garut	55.12	12.31	(4.49)	72.06	34
Kabupaten Tasikmalaya	118.88	20.90	15.95	87.92	61
Kabupaten Ciamis	55.20	(1.11)	13.56	8.88	19
Kabupaten Kuningan	80.31	12.96	14.42	32.32	35
Kabupaten Cirebon	80.51	5.72	10.52	5.43	26
Kabupaten Majalengka	56.57	27.17	16.84	54.97	39
Kabupaten Sumedang	59.17	8.47	5.63	59.99	33
Kabupaten Indramayu	87.80	5.72	1.24	64.47	40
Kabupaten Subang	81.72	20.38	14.07	(34.93)	20
Kabupaten Purwakarta	65.05	15.44	3.03	38.51	31
Kabupaten Karawang	37.58	16.21	(5.03)	39.36	22
Kabupaten Bekasi	34.06	19.13	4.01	20.54	19
Kabupaten Bandung Barat	32.87	26.51	19.58	62.12	35
Kabupaten Pangandaran	-	455.03	(63.17)	77.77	157
Kota Bogor	17.58	15.19	24.90	24.74	21
Kota Sukabumi	47.73	7.11	6.65	21.60	21
Kota Bandung	18.94	8.37	15.76	19.77	16
Kota Cirebon	44.91	7.15	13.51	22.26	22
Kota Bekasi	24.29	24.25	12.62	4.21	16
Kota Depok	13.41	24.13	12.75	31.24	20
Kota Cimahi	18.97	17.93	6.41	34.21	19
Kota Tasikmalaya	46.60	(53.45)	115.76	39.41	37
Kota Banjar	67.92	1.04	(2.93)	7.85	18

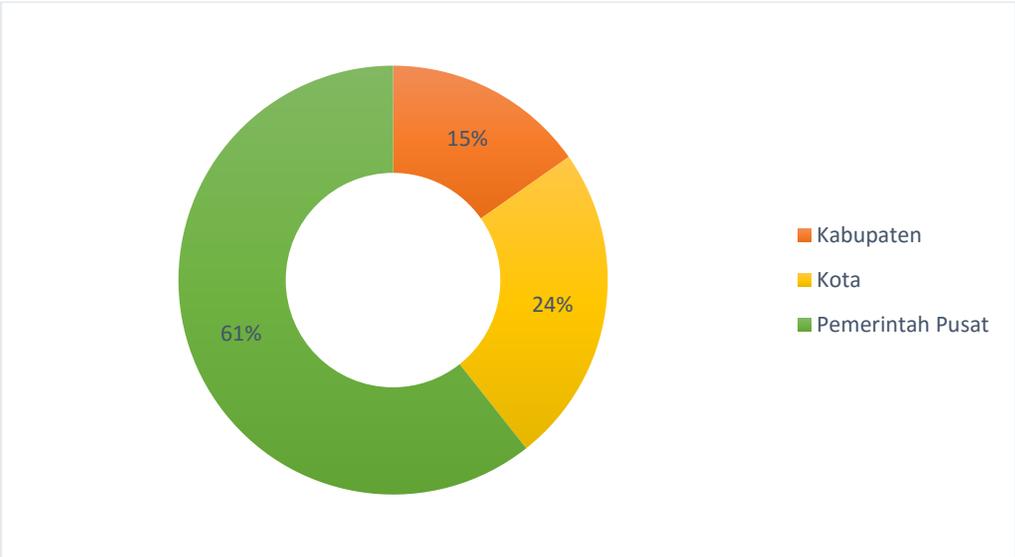
Lampiran 5. Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat
2013-2017*(Dalam Persen)

Keterangan	Tahun				Rata-rata
	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	
Kabupaten Bogor	17.62	10.35	0.78	16.62	11
Kabupaten Sukabumi	22.19	9.16	5.99	10.15	12
Kabupaten Cianjur	16.93	18.48	4.10	16.12	14
Kabupaten Bandung	19.91	10.85	2.92	0.95	9
Kabupaten Garut	14.92	8.82	9.80	16.35	12
Kabupaten Tasikmalaya	15.94	3.20	21.32	3.43	11
Kabupaten Ciamis	(8.69)	14.30	3.50	4.16	3
Kabupaten Kuningan	16.71	25.07	5.36	3.16	13
Kabupaten Cirebon	18.03	15.66	6.35	6.81	12
Kabupaten Majalengka	14.80	21.22	3.31	4.24	11
Kabupaten Sumedang	21.69	12.93	1.54	11.10	12
Kabupaten Indramayu	21.54	11.70	8.71	4.78	12
Kabupaten Subang	22.19	7.75	6.95	(26.79)	3
Kabupaten Purwakarta	16.13	10.49	7.06	14.23	12
Kabupaten Karawang	18.81	13.46	(1.57)	16.05	12
Kabupaten Bekasi	16.68	15.25	1.15	9.12	11
Kabupaten Bandung Barat	14.39	13.81	3.05	21.43	13
Kabupaten Pangandaran	-	57.84	(9.25)	48.55	32
Kota Bogor	11.64	8.85	12.50	6.35	10
Kota Sukabumi	18.16	7.00	9.02	4.57	10
Kota Bandung	14.35	2.91	11.52	0.88	7
Kota Cirebon	22.19	13.76	(2.15)	1.20	9
Kota Bekasi	17.48	13.48	8.63	5.09	11
Kota Depok	14.91	11.52	0.99	14.52	10
Kota Cimahi	14.54	6.24	2.71	17.37	10
Kota Tasikmalaya	16.85	(7.27)	8.62	13.48	8
Kota Banjar	8.34	9.28	10.86	(0.38)	7

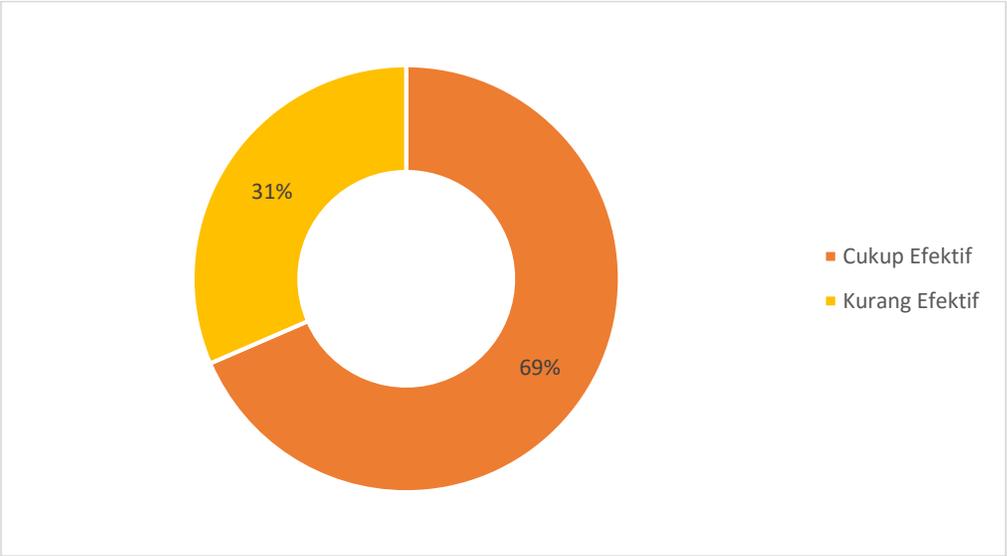
Lampiran 5. Rasio Pertumbuhan Belanja Provinsi Jawa Barat 2013-2017*(Dalam Persen)

Keterangan	Belanja Tidak Langsung				Rata-rata	Belanja Langsung				Rata-rata
	Tahun					Tahun				
	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017		2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	
Kabupaten Bogor	7.97	10.57	24.67	19.12	16	4.74	(18.10)	55.06	(5.30)	9
Kabupaten Sukabumi	10.73	21.02	7.00	0.21	10	16.86	9.54	4.22	18.67	12
Kabupaten Cianjur	10.58	16.70	5.65	36.34	17	39.51	19.79	18.74	11.22	22
Kabupaten Bandung	13.32	77.47	(31.13)	(11.29)	12	24.76	25.28	(4.04)	(0.47)	11
Kabupaten Garut	5.17	72.07	(27.45)	47.07	24	1.95	(56.12)	162.54	17.47	31
Kabupaten Tasikmalaya	11.14	20.26	8.71	34.95	19	12.58	0.05	52.02	(7.92)	14
Kabupaten Ciamis	(10.59)	4.88	8.60	34.74	9	(2.53)	37.76	2.17	(20.50)	4
Kabupaten Kuningan	8.89	20.80	16.21	25.56	18	15.73	49.45	4.59	(4.17)	16
Kabupaten Cirebon	5.67	20.07	10.56	28.60	16	18.01	11.09	20.50	10.43	15
Kabupaten Majalengka	7.59	15.11	55.34	4.17	21	29.59	23.54	(42.58)	50.81	15
Kabupaten Sumedang	11.64	8.85	23.23	16.95	15	38.88	22.80	(13.39)	20.47	17
Kabupaten Indramayu	7.85	20.77	6.71	7.63	11	36.51	4.25	18.50	(2.70)	14
Kabupaten Subang	7.25	8.18	17.42	36.38	17	54.12	3.19	8.97	(25.07)	10
Kabupaten Purwakarta	1.61	14.74	3.65	39.56	15	30.14	20.25	(6.12)	8.96	13
Kabupaten Karawang	18.74	9.80	10.30	22.76	15	9.76	19.60	(4.08)	23.24	12
Kabupaten Bekasi	23.11	10.96	30.02	19.06	21	9.23	13.01	5.93	(2.20)	6
Kabupaten Bandung Barat	9.63	7.62	15.15	38.26	18	13.64	13.65	8.77	6.02	11
Kabupaten Pangandaran	-	41.56	0.70	95.75	46	-	283.38	(11.57)	84.15	119
Kota Bogor	2.66	12.03	3.54	27.01	11	39.34	7.17	22.38	(9.34)	15
Kota Sukabumi	4.42	5.89	3.92	2.69	4	15.14	24.82	13.79	(1.40)	13
Kota Bandung	10.59	1.86	7.24	5.21	6	9.63	34.49	1,540.00	(93.83)	373
Kota Cirebon	13.04	4.81	0.86	(1.52)	4	33.10	22.13	14.06	(5.23)	16
Kota Bekasi	9.67	6.53	23.26	39.84	20	1.69	38.95	33.47	(29.59)	11
Kota Depok	8.74	15.20	8.33	31.23	16	5.67	4.22	38.40	(20.64)	7
Kota Cimahi	6.61	0.32	15.49	(51.16)	(7)	20.38	5.92	36.85	11.73	19
Kota Tasikmalaya	11.28	5.01	5.55	0.28	6	10.80	(13.24)	54.56	9.84	15
Kota Banjar	6.14	9.49	18.57	(3.21)	8	(6.49)	16.42	23.39	(15.93)	4

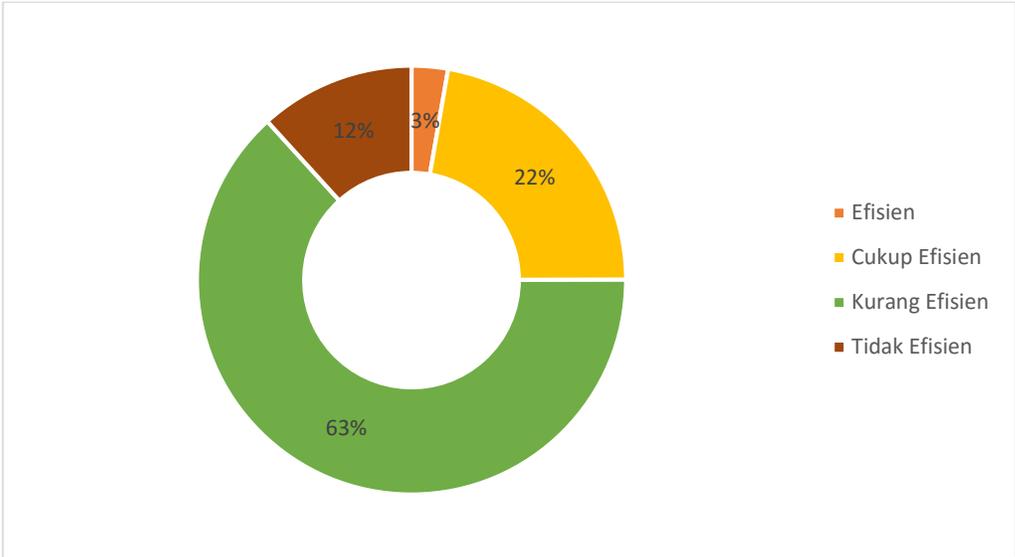
Lampiran 6. Diagram Rasio Kemandirian Provinsi Jawa Barat 2013-2017



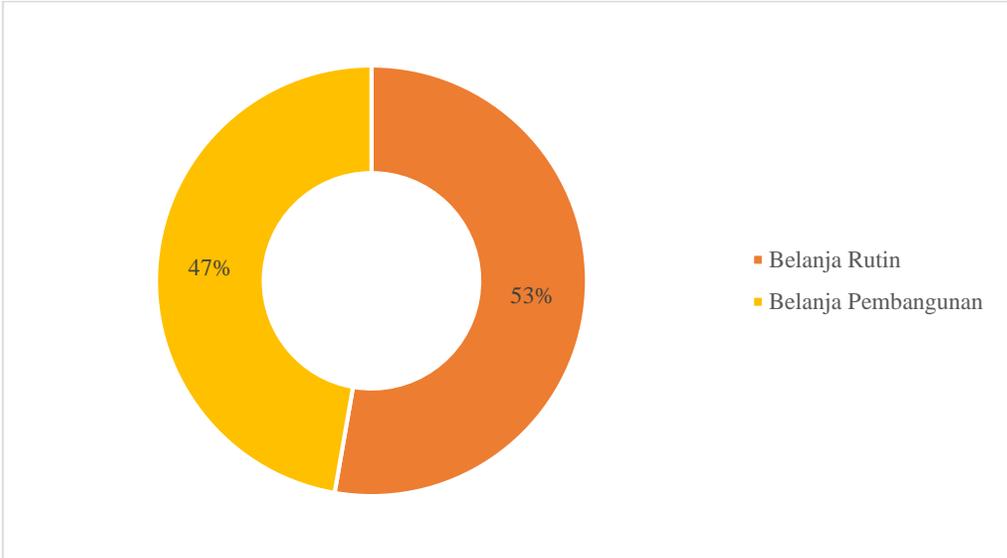
Lampiran 7. Diagram Rasio Efektivitas Provinsi Jawa Barat 2013-2017



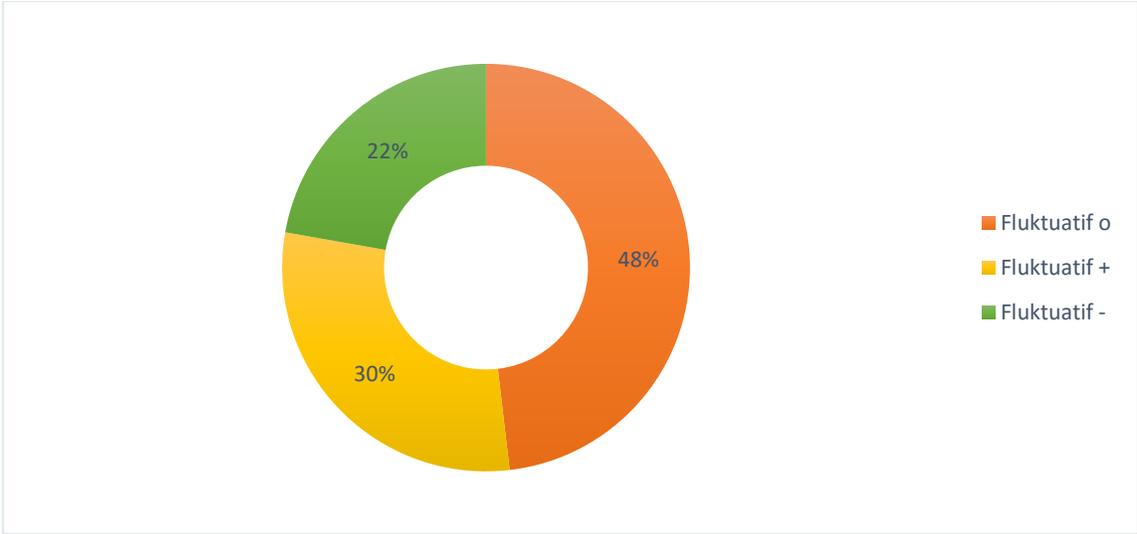
Lampiran 8. Diagram Rasio Efisiensi Provinsi Jawa Barat 2013-2017



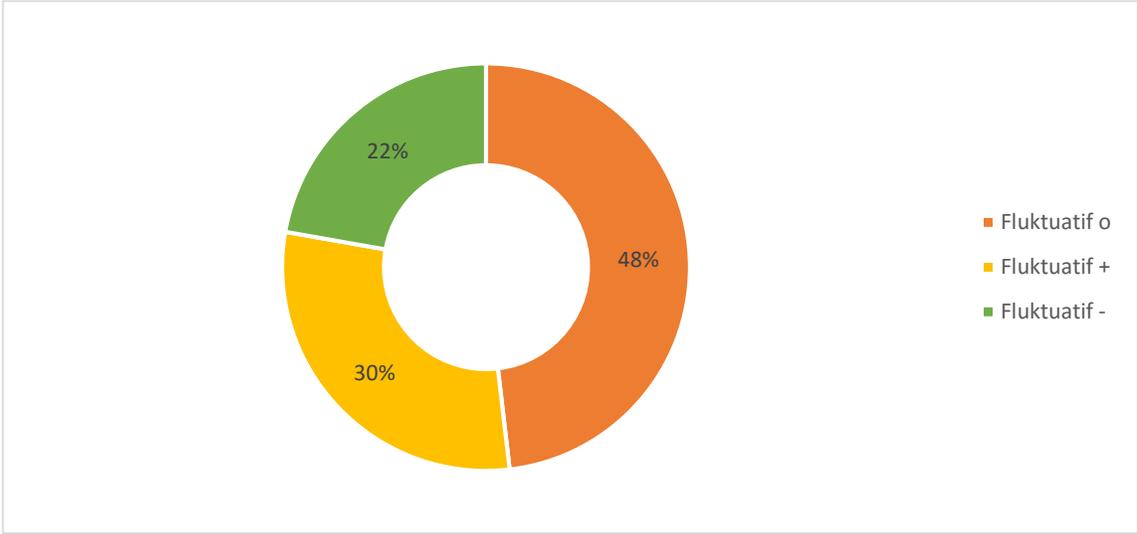
Lampiran 9. Diagram Rasio Aktivitas Belanja Provinsi Jawa Barat 2013-2017



Lampiran 10. Diagram Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat 2013-2017



Lampiran 10. Diagram Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat 2013-2017



Lampiran 10. Diagram Rasio Pertumbuhan Belanja Provinsi Jawa Barat 2013-2017

